

Metabolisme PARIWISATA Berkelanjutan

Kawasan Pesisir Pantai Teluk Manado

Pariwisata dapat menjadi andalan sumber pendapatan suatu daerah di Indonesia. Saat ini, Bali merupakan contoh provinsi yang selalu mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, Lombok juga merupakan contoh daerah yang secara ekonomi bergantung pada pariwisata. Menurut Sorensen & Epps (2003), sumbangan sektor pariwisata dalam perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari data statistik pertumbuhan sektor bangunan dan akomodasi, serta data tentang tenaga kerja.

Pariwisata di kawasan pesisir lebih diarahkan pada pengembangan kegiatan wisata minat khusus sebagai kegiatan utama dan kegiatan wisata rekreasi edukatif sebagai kegiatan pendukung. Wisata minat khusus merupakan perjalanan wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus terhadap suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di lokasi tujuan wisata. Dalam wisata minat khusus, wisatawan terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan fisik atau komunitas yang dikunjunginya. Wisata pesisir merupakan bagian dari wisata minat khusus. Prospek pengembangan wisata pesisir di Indonesia cukup cerah karena potensi objek wisata tersebut sangat bagus. Terdapat beberapa taman nasional laut, taman wisata laut, suaka alam laut, serta situs peninggalan budaya bawah air yang tersebar luas di wilayah Indonesia.

Dalam buku ini berisi tentang bagaimana lingkungan dimaksimalkan perannya melalui partisipasi masyarakat, pariwisata berkelanjutan, metabolisme, dan usulan tahapan metabolisme pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan bahan pembelajaran bagi akademisi serta praktisi, sehingga memberikan dampak baik bagi kita semua, selamat membaca.



Anggota IKAPI No. 209/JT/2018
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara
085755971589



Felly Ferol Warouw, dkk.

Metabolisme PARIWISATA Berkelanjutan



Metabolisme PARIWISATA Berkelanjutan

Kawasan Pesisir Pantai Teluk Manado

Felly Ferol Warouw
Christi Diana Mambo
Lady Grace Jane Giroth
Brienne Eucleysia Jo Komedi

Metabolisme
PARIWISATA
Berkelanjutan

Kawasan Pesisir Pantai Teluk Manado

Felly Ferol Warouw
Christi Diana Mambo
Lady Grace Jane Giroth
Brianne Eucleysia Jo Komedien

**METABOLISME PARIWISATA BERKELANJUTAN
KAWASAN PESISIR PANTAI TELUK MANADO**

Penulis : Felly Ferol Warouw
Christi Diana Mambo
Lady Grace Jane Giroth
Brianne Euckleysia Jo Komedi

ISBN : 978-623-329-488-1

Copyright © November 2021

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vi + 128

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi
Penata isi : Hasan Almumtaza

Cetakan I, November 2021

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

KATA PENGANTAR

Keagungan bagi pencipta Alam Semesta yang telah memberikan inspirasi dalam berbagai dinamika hingga akhirnya Buku ***METABOLISME PARIWISATA BERKELANJUTAN DI REGION PESISIR*** dapat tersusun.

Pembaca yang budiman serta saya hormati, buku ini kami hadirkan di hadapan anda dengan harapan dapat menjadi pedoman dan referensi untuk menambah khasanah pengetahuan menyangkut pengembangan pariwisata berkelanjutan terutama era pandemi covid -19 dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Dalam buku *ini* berisi tentang bagaimana lingkungan dimaksimalkan perannya melalui partisipasi masyarakat, *pariwisata berkelanjutan*, *metabolisme*, dan usulan tahapan *metabolisme pariwisata berkelanjutan* di kawasan pesisir.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan bahan pembelajaran bagi akademisi serta praktisi, sehingga memberikan dampak baik bagi kita semua, selamat membaca.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
MEMAHAMI PARIWISATA BERKELANJUTAN.....	1
Pariwisata Kawasan Pesisir Indonesia	1
Aturan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pesisir.....	4
Karakteristik dan Pengelolaan Pesisir Terpadu.....	7
PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN PESISIR	15
Pariwisata Berkelanjutan dalam Kajian Ilmu Lingkungan ...	15
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Pesisir	17
KAWASAN PESISIR PANTAI TELUK MANADO.....	25
Letak Geografis.....	26
Luas Wilayah.....	27
Iklim dan Fisik Alam	28
Morfologis	30
Demografis.....	31
Sosial Masyarakat	32
Ekosistem	33
Kondisi Lingkungan	37
Kondisi Pariwisata.....	50
Faktor Pendorong Pengembangan Pariwisata di Pesisir Pantai Teluk Manado	56

PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR PANTAI TELUK MANADO	59
Potensi Pariwisata Pesisir Pantai Teluk Manado	59
Perkembangan Pariwisata Pesisir di Pantai Teluk Manado ...	63
Kelemahan Pengembangan Pariwisata Pesisir Pantai Teluk Manado.....	72
Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Pantai Teluk Manado	74
PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS PARTISIPASI	79
Pengertian Pendekatan Partisipasi.....	79
Pendekatan Partisipasi Berbasis Masyarakat.....	83
Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Partisipasi	85
PENERAPAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS PARTISIPASI DI PESISIR PANTAI TELUK MANADO	93
Pemahaman <i>Stakeholder</i> terhadap Prinsip Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Pantai Teluk Manado	93
Tingkat Partisipasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	96
Metabolisme Pariwisata Berkelanjutan di kawasan Pesisir Pantai Teluk Manado	99
Daftar Pustaka.....	113
Profil Penulis.....	125

MEMAHAMI PARIWISATA BERKELANJUTAN

Pariwisata Kawasan Pesisir Indonesia

Luas lautan Indonesia mencapai 7,9 juta km², sedangkan luas daratannya hanya 1,9 juta km². Indonesia tercatat memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai sampai 104.093 km. Perairan laut Indonesia sangat unik dan memiliki keanekaragaman hayati dengan topografi dasar laut yang beragam dan kompleks, bahkan mendapat julukan *marine mega biodiversity* terbesar di dunia. Tercatat ada 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Luas ekosistem *mangrove* Indonesia mencapai 22% dari seluruh luas *mangrove* dunia.

Wilayah laut yang luas menjadikan Indonesia memiliki banyak daerah pesisir sebagai penunjang kehidupan masyarakat sekitarnya. Daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi melalui kegiatan masyarakat, seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (*aquakultur*), transportasi, pengeboran minyak, dan pariwisata. Sektor pariwisata merupakan kontributor terbesar ketiga penghasil devisa negara, setelah minyak dan gas bumi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2012), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia pada tahun 2012 merilis kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan angka sebesar Rp.153,25 triliun atau 3,09% dari total PDB Indonesia.

Menurut Kreag (2001), pembangunan sektor pariwisata dapat membawa dampak positif bagi dimensi sosial budaya, seperti

peningkatan kualitas hidup; perubahan positif dalam nilai-nilai dan adat istiadat; peningkatan pertukaran budaya; peningkatan pemahaman masyarakat; perlindungan identitas budaya; peningkatan permintaan untuk pameran sejarah dan budaya; serta toleransi yang lebih besar dari perbedaan sosial. Sementara itu, dampak positif sektor pariwisata bagi lingkungan fisik yaitu mampu melindungi lingkungan alam dan mencegah penurunan kualitas ekologis. Selain itu, sektor pariwisata juga melestarikan bangunan-bangunan dan dapat meningkatkan penampilan suatu daerah secara visual dan estetika.

Pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Indonesia merupakan pilihan strategis, mengingat potensi ini memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan potensi serupa di negara-negara lain. Hamparan laut dan samudra Indonesia bertebaran di sepanjang jazirah Nusantara, seperti Bunaken (Sulawesi Utara), Derawan (Kalimantan Timur), Pulau Tukang Besi (Sulawesi Tenggara), Pulau Balaido (Papua), Pulau Rinca Komodo (Nusa Tenggara Timur).

Pariwisata dapat menjadi andalan sumber pendapatan suatu daerah di Indonesia. Saat ini, Bali merupakan contoh provinsi yang selalu mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, Lombok juga merupakan contoh daerah yang secara ekonomi bergantung pada pariwisata. Menurut Sorensen & Epps (2003), sumbangan sektor pariwisata dalam perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari data statistik pertumbuhan sektor bangunan dan akomodasi, serta data tentang tenaga kerja.

Pariwisata di kawasan pesisir lebih diarahkan pada pengembangan kegiatan wisata minat khusus sebagai kegiatan utama dan kegiatan wisata rekreasi edukatif sebagai kegiatan pendukung. Wisata minat khusus merupakan perjalanan wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus terhadap suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di lokasi tujuan wisata. Dalam wisata minat khusus, wisatawan terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan fisik atau komunitas yang dikunjunginya. Wisata pesisir merupakan bagian dari wisata minat khusus. Prospek pengembangan wisata pesisir di Indonesia cukup cerah karena potensi objek wisata tersebut sangat bagus. Terdapat

beberapa taman nasional laut, taman wisata laut, suaka alam laut, serta situs peninggalan budaya bawah air yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Berikut beberapa contoh wisata kawasan pesisir di Indonesia yang memadukan antara wisata daratan dan lautan.

1. Raja Ampat

Menurut data Ditjen KP3K (2013), berikut aktivitas pariwisata yang dikembangkan di kawasan ini.

- a. Penangkapan cacing laut yang dilakukan secara bersama-sama oleh ibu-ibu dan anak-anak, mengunjungi tempat peneluran penyu hijau, dan wisata dayung tradisional dengan perahu.
- b. Wisata gua-gua peninggalan Perang Dunia II dan keindahan bawah laut.
- c. Atraksi fenomena alam, yaitu cahaya yang keluar dari laut dan berputar-putar di permukaan sekitar 10-18 menit, setelah itu hilang dan hanya dapat disaksikan lagi saat pergantian tahun berikutnya.
- d. Menyaksikan cara penangkapan ikan secara tradisional dan bangkai kerangka pesawat yang bisa dijadikan sebagai tempat penyelaman.
- e. Menyaksikan bunker-bunker peninggalan Perang Dunia II buatan Belanda dan Jepang yang juga dapat dijadikan untuk snorkeling dan *diving*.

2. Wakatobi, Bali, dan Lombok

Menurut data Ditjen KP3K (2013), aktivitas pariwisata yang dikembangkan di tempat ini antara lain, selam; snorkeling; memancing; budidaya rumput laut; melihat penyu bertelur dan aktivitas penangkapan nener; serta melihat matahari terbit dan terbenam.

Sebagaimana lokasi di atas, Kota Manado dengan potensi wisata pantai yang menjadi pusat segitiga karang dunia sedang mengembangkan kebijakan pengembangan pariwisata. Pariwisata yang sedang dikembangkan tentunya harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan yang dinamis saat ini. Sejauh mana proses adaptasi ditentukan oleh masyarakat yang terlibat dalam

pengembangan pariwisata. Berdasarkan data jumlah penduduk di Kota Manado saat ini berjumlah 410.481 ribu jiwa. Sejauh mana partisipasi masyarakat di Kota Manado khususnya keterlibatannya dalam pengembangan pariwisata di pesisir Teluk Manado menjadi *concern* khusus. Tingkat partisipasi dikembangkan oleh Arnstein Sheery deretan ketinggian tingkat rendah yaitu: Manipulasi, Terapi, menginformasikan, Konsultasi, placation, kemitraan, Kekuasaan Delegasi, Kontrol Warga. Temuan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata pantai di teluk Manado tingkat keadaban konsultasi. Tingkat konsultasi menunjukkan bahwa pemerintah mengundang opini publik setelah diberikan informasi kepada publik dan telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat telah memberikan masukan dan diskusi aktif melalui dialog dua arah. Meski telah dilakukan dialog dua arah, namun tingkat keberhasilannya rendah karena tidak ada jaminan bahwa keprihatinan dan gagasan masyarakat akan diperhatikan. Untuk itu diperlukan pengembangan program berbasis masyarakat guna meningkatkan derajat partisipasi sehingga partisipasi masyarakat akan meningkat. Kesimpulannya, program perlu didasarkan pada masukan dari kebutuhan masyarakat dan harus melibatkan masyarakat secara langsung untuk pengembangan pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat itu sendiri (Warouw et, al 2018)

Aturan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pesisir

Fungsi hukum atau aturan pengembangan pariwisata ialah untuk menciptakan kepastian mengenai larangan-larangan ataupun hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengelola pariwisata. Menurut Diraputra (2003), pengelolaan sumber daya pesisir dan laut harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi saat ini dan keberlanjutan pemanfaatan antargenerasi. Budiharsono (2001) menambahkan, potensi wilayah pesisir yang belum terkelola secara maksimal disebabkan belum adanya kelembagaan yang mendukung sektor kelautan.

Inti kebijakan pariwisata Indonesia terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional

yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama; budaya yang hidup dalam masyarakat; kelestarian dan mutu lingkungan hidup; serta kepentingan nasional. Setiap orang/masyarakat yang berada di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas dalam pengelolaan sumber daya di wilayah tersebut untuk menunjang usaha pariwisata.

Lebih lanjut, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tersebut, pariwisata diartikan sebagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Sementara itu, pariwisata berkelanjutan (*sustainable coastal tourism*) diartikan sebagai pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan maupun daerah tujuan wisata pada masa kini, sekaligus melindungi dan mendorong kesempatan serupa dimasa yang akan datang. Menurut WTO (1980), pariwisata berkelanjutan mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi. Selain itu, juga bertujuan memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial keanekaragaman hayati, serta sistem pendukung kehidupan. Berkaitan dengan pariwisata di kawasan pesisir, DPR RI mengesahkan undang-undang tentang kelautan untuk mempertegas pentingnya pengembangan kelautan sebagai bagian penting dalam proses pengembangan pembangunan.

Potensi pariwisata di Indonesia didukung dengan berbagai bentuk hierarki peraturan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi dan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Provinsi, Keputusan Gubernur, hingga peraturan tingkat Kabupaten dan Kota. Pada tingkat nasional, terdapat beberapa UU yang secara eksplisit atau implisit menyatakan panduan yang harus diikuti, sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Kepariwisataan bertanggung jawab melestarikan dan menghargai agama, budaya dan nilai setempat; menyediakan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, pelayanan yang tidak diskriminatif, menciptakan kenyamanan, keramahan, dan aman bagi wisatawan; mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro lokal dan koperasi yang berbasis prinsip saling menguntungkan; memprioritaskan

produk lokal dan peluang pekerjaan bagi penduduk lokal; secara aktif terlibat dalam pelatihan dan pendidikan keterampilan; pemberdayaan komunitas; menjaga lingkungan alam agar tetap bersih, hijau dan aman; serta memberlakukan standar usaha dan kompetensi berdasarkan peraturan. Berikut aturan-aturan pengembangan pariwisata di kawasan pesisir yang berlaku di Indonesia.

1. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati dan Ekosistemnya.* Undang-undang ini berisi pembahasan tentang konservasi terhadap berbagai keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
2. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.* Undang-undang ini berisi tentang isu-isu ketenagakerjaan, termasuk tanggung jawab komunitas yang mempunyai kuasa dalam pengembangan kesempatan bekerja.
3. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.* Undang-undang ini bertujuan membantu koordinasi, integrasi, dan sinergi, keterkaitan dan konsistensi, partisipasi komunitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
4. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.* Undang-Undang ini membahas tentang pemerintah daerah yang berhubungan dengan pembagian pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, juga membahas tentang kewenangan pengelolaan sumber daya laut, sejauh 4 mil diukur dari garis pantai ke arah laut untuk kabupaten kota, sedangkan untuk provinsi yaitu 12 mil.
5. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.* Undang-undang ini membahas tentang pengembangan dan pengelolaan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan.
6. *Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.* Undang-undang ini membahas tentang proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. Undang-undang ini mencakup perlindungan, pengelolaan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan lingkungan.
8. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Warisan Budaya*. Undang-undang ini bertujuan untuk mengonservasi warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat, identitas dan martabat nasional, serta mempromosikannya kepada komunitas internasional.
9. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Undang-undang ini membahas tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah ;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Karakteristik dan Pengelolaan Pesisir Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan pesisir diartikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, wilayahnya sejauh 12 mil ke arah laut diukur dari garis pantai. Dahuri (2001) menambahkan, wilayah pesisir secara geografis diartikan sebagai suatu wilayah pertemuan antara darat dan laut. Arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut,

angin laut, dan perembesan air asin. Sementara itu, arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, ataupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

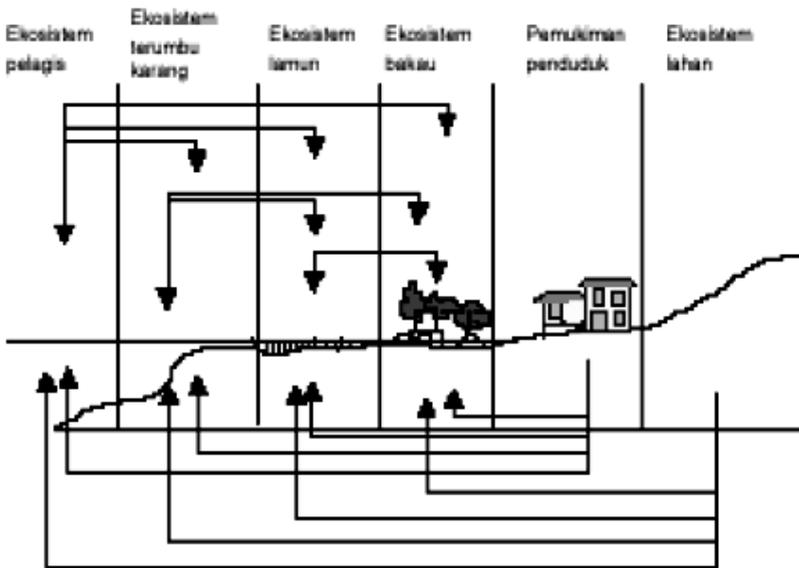
Menurut Scura *et al.* (1992) (dalam Cicin-Sain & Knecht, 1998), wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan daratan dan laut yang di dalamnya terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan darat dan laut. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik berikut.

1. Memiliki habitat dan ekosistem, seperti estuari, terumbu karang, dan padang lamun yang dapat menjadi tempat hidup ikan, minyak bumi, dan mineral. Selain itu, habitat dan ekosistem tersebut juga dapat dijadikan perlindungan alam dari badai, arus pasang surut, dan juga rekreasi untuk masyarakat pesisir.
2. Memiliki persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga sering terjadi konflik yang berdampak pada menurunnya fungsi sumber daya.
3. Menyediakan sumber daya ekonomi nasional. Wilayah pesisir dapat menghasilkan GNP (*Gross National Product*) dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut, seperti pengembangan perkapalan, perminyakan, gas, pariwisata pesisir, dan lain-lain.
4. Memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan wilayah urbanisasi.

Berdasarkan sudut pandang ekologi, wilayah laut merupakan lokasi beberapa ekosistem unik, saling terkait, dinamis, dan produktif. Menurut Bengen (2002), ekosistem utama di pesisir dan laut terdiri dari estuari, hutan *mangrove*, padang lamun, terumbu karang, pantai berbatu, dan pulau-pulau kecil. Dahuri *et al.* (2006) menambahkan, ekosistem wilayah pesisir dan laut memiliki keanekaragaman habitat yang sangat beraneka ragam.

Umumnya, jenis ekosistem di wilayah pesisir ditinjau dari penggenangan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem yang

tergenang di air secara berkala dan ekosistem yang tidak pernah tergenang air. Jika ditinjau dari proses terbentuknya, ekosistem wilayah pesisir dapat dikelompokkan menjadi ekosistem yang terbentuk secara alami dan ekosistem yang sengaja dibentuk atau ekosistem buatan, seperti tambak, sawah, pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pemukiman.



Gambar 1.1. Hubungan Ekosistem di Pesisir

Ekosistem-ekosistem yang terdapat di kawasan pesisir ini memiliki keterkaitan hubungan, maka membutuhkan pengelolaan yang tepat agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah melakukan pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu. Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu diartikan sebagai kegiatan pengelolaan sumber daya alam di kawasan laut dan pesisir yang dilakukan melalui penilaian secara terpadu (*comprehensive assesment*) untuk mencapai pembangunan optimal dan berkelanjutan. Kunci keberhasilan dalam pengelolaan pesisir secara terpadu ialah partisipasi masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat merupakan pemegang kepentingan utama dalam pengelolaan kawasan pesisir. Selain itu, masyarakat juga memiliki ketersediaan pengaturan pengelolaan sumber daya secara formal,

tingkat kepatuhan masyarakat, dan pelaksanaan pemantauan yang cukup.

Menurut Cicin-Sain (dalam Darajati *et al*, 2004), pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu merupakan suatu pendekatan pengelolaan yang meliputi lima dimensi keterpaduan, yaitu keterpaduan ekologis, keterpaduan sektor, keterpaduan pemangku kepentingan (*stakeholder*), keterpaduan disiplin ilmu, dan keterpaduan antarnegara. Selanjutnya, Goodwin (1999) mengemukakan bahwa program pengelolaan kawasan pesisir dikatakan efektif jika memenuhi empat syarat, yaitu (1) mewujudkan kebijakan formal untuk tujuan revitalisasi *waterfront* yang rusak, (2) mempunyai bantuan teknis atau keuangan dalam bentuk kemitraan, (3) meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi masyarakat, dan (4) menambahkan aksesibilitas publik terhadap air, kerusakan lingkungan, serta memelihara situs dan struktur sejarah.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) atau *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* pertama kali dikemukakan dalam Konferensi Pesisir Dunia (*World Conference of Coast*) yang digelar tahun 1993 di Belanda. Dalam forum tersebut, pengelolaan wilayah pesisir terpadu diartikan sebagai proses paling tepat untuk mengatasi masalah pengelolaan pesisir. Menurut Sugiarto (1996), pengelolaan pesisir secara terpadu dilakukan untuk kepentingan saat ini dan jangka panjang, termasuk permasalahan kerugian habitat, degradasi kualitas air akibat pencemaran, perubahan siklus hidrologi, berkurangnya sumber daya pesisir, kenaikan muka air laut, serta dampak perubahan iklim dunia.

Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir, terdapat lima aspek yang harus dipenuhi selama proses pengelolannya, yaitu (1) keterpaduan wilayah/ekologis, (2) keterpaduan sektoral, (3) keterpaduan kebijakan secara vertikal, (4) keterpaduan disiplin ilmu, dan (5) keterpaduan *stakeholder*. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan suatu proses yang saling berkaitan setiap aspeknya. Maka dari itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan membutuhkan *one plan* dan *one management*.

Salah satu wilayah pesisir yang dapat dikembangkan ialah pulau

kecil. Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pulau kecil diartikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Sementara itu, pulau-pulau kecil diartikan sebagai kumpulan pulau-pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi tersebut dapat dilakukan secara individual maupun sinergis, bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumber daya. Menurut Bengen (2004), pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki karakteristik biogeofisik tersendiri, yaitu

1. terpisah dari habitat pulau induk (*mainland island*);
2. memiliki sumber daya air permukaan dan air tanah terbatas dan daerah tangkapan airnya juga relatif kecil atau sangat terbatas sehingga sebagian aliran air permukaan dan sedimen akan diteruskan ke laut;
3. rentan terhadap pengaruh yang bersifat alami (badai dan gelombang besar) maupun akibat kegiatan manusia (pengubahsuaian lahan dan pencemaran);
4. memiliki sejumlah spesies endemik yang bernilai ekologis tinggi;
5. area perairan lebih luas daripada daratan; serta
6. memiliki *hinterland* yang jauh dari pantai.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengemukakan dua faktor yang memengaruhi keberlanjutan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *Pertama*, interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan destruktif, reklamasi pantai, pemanfaatan *mangrove*, dan pariwisata bahari. *Kedua*, proses-proses alamiah seperti abrasi, sedimentasi, ombak, gelombang laut, arus, angin, salinitas, pasang surut, gempa tektonik, dan tsunami.

Menurut Dahuri *et al.* (2008) menjelaskan, sumber daya alam yang terdapat di kawasan pulau-pulau kecil terdiri atas sumber daya yang dapat pulih, sumber daya tidak dapat pulih, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, plankton, bentos, moluska, mamalia laut, rumput laut, lamun,

mangrove, terumbu karang, dan krustasea. Sementara itu, sumber daya yang tidak dapat pulih meliputi minyak bumi, gas, mineral, serta bahan tambang/galian seperti biji besi, pasir, timah, dan bauksit. Selanjutnya, jasa-jasa lingkungan terdiri dari pariwisata dan perhubungan laut.

Pulau-pulau kecil memiliki satu atau lebih ekosistem dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir tersebut dapat bersifat alamiah ataupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat di pulau-pulau kecil seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, formasi *pes-caprea*, formasi *barringtonia*, estuari, laguna, dan delta. Sementara itu, ekosistem buatan seperti kawasan pariwisata, kawasan budidaya, dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 67 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil, dinyatakan bahwa pulau-pulau kecil memiliki daya dukung terbatas yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatannya untuk suatu kegiatan, termasuk kegiatan pariwisata. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan pun perlu direncanakan secara cermat, disesuaikan dengan potensi dan daya dukung masing-masing pulau. Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan. Pengembangan dilakukan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, tetapi mempertahankannya untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan konservasi. Berikut aspek mendasar yang perlu diperhatikan sebagai usaha menjaga fungsi ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil.

1. Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersifat rentan harus berbasis kepedulian atau kesadaran terhadap lingkungan.
2. Sistem pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Indikator keberhasilan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil

dilihat dari kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Yudhohusodo (1988) mengatakan, prinsip konservasi dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil mengandung implikasi bahwa keberadaan berbagai pihak turut mendukung terbentuknya sistem yang menjamin perlindungan terhadap kesinambungan kualitas lingkungan hidup, serta memastikan kegiatan usaha dan jasa di pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan dengan memperhatikan kaidah ekologi dan peka terhadap nilai sosial budaya masyarakat. Selain itu, pengelolaan juga harus menentukan ambang batas (*carrying capacity*) secara formal maupun ekologis untuk meminimalisasi akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan.

Salah satu fungsi pulau-pulau kecil ialah sebagai pengatur iklim global, serta menjadi habitat dan ekosistem lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pulau-pulau kecil menjadi kawasan yang sangat sensitif terhadap perubahan. Menurut Lucky (2004), pemanfaatan potensi sumber daya keanekaragaman hayati, ekosistem, serta nilai kekhasan dan keaslian yang ada di pulau-pulau kecil harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadudengan berbasis perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan.

Dengan pendekatan di atas, diharapkan dapat meningkatkan apresiasi, pemahaman, dan kesadaran akan ekosistem yang menjadi tatanan unsur keseimbangan lingkungan hidup di kawasan pulau-pulau kecil. Aridiwidjaja (2013) mengatakan, pendekatan ekologis menjadi upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan sekaligus menjadi rambu pembangunan berkelanjutan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN PESISIR

Pariwisata Berkelanjutan dalam Kajian Ilmu Lingkungan

Pembangunan pariwisata akan terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Menurut Salim (2010), pola pembangunan konvensional yang dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan karena pembangunan konvensional meletakkan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan, sedangkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, dibutuhkan model pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan dalam tiga jalur pertumbuhan yang terus bergerak maju dan saling berinteraksi di antara ketiganya.

Salah satu pembangunan yang dapat dilakukan ialah pola pembangunan berkelanjutan. Pola pembangunan ini harus merombak habis paradigma pembangunan konvensional yang saat ini berlaku. Kepentingan pembangunan dalam jangka pendek harus lebih diseimbangkan dengan kepentingan jangka panjang. Kepentingan sosial dan lingkungan harus ditempatkan pada posisi yang setara dengan kepentingan ekonomi. Kepentingan sosial masyarakat harus lebih diselaraskan dengan kepentingan individu. Kegagalan pasar harus dikoreksi, serta biaya sosial dan lingkungan harus diinternalisasikan dalam bentuk biaya ekonomi. Kegagalan pemerintah harus diatasi lewat kemitraan yang setara antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil. Kelompok sipil dan masyarakat harus memegang

peranan yang penting dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan berkelanjutan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup (manusia dan perilakunya) yang memengaruhi alam, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia/makhluk hidup lainnya.

Sugandhy (2008) menyatakan, lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung setiap lingkungan hidup juga berbeda. Keadaan ini memerlukan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan dalam satu kesatuan sistem dan subsistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan pendekatan yang menekankan prinsip etika lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa hubungan antara manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Agar manusia beretika lingkungan, maka diperlukan perubahan sikap terhadap alam. Jika manusia hidup menyatu dengan alam dan memanfaatkannya secara ramah, maka hubungannya dengan lingkungan akan terbangun dalam bentuk kedamaian.

Sejalan dengan hal tersebut, ilmu lingkungan sebagai ilmu multidisipliner dan interdisipliner bertujuan untuk mengukur dan menilai perubahan serta dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem demi kehidupannya. Pemahaman ini berawal dari pemahaman tentang konsep ekosistem yang menekankan adanya saling keterkaitan dan ketergantungan antarkomponen atau bagian yang membangun alam. Konsep ekosistem ini merupakan konsep penting dalam ekologi, suatu cabang biologi yang mendasari pengetahuan

lingkungan. Prinsip ekologi yang menjadi dasar pengembangan ilmu lingkungan ialah *harmony, diversity, interdependence, interaction*, dan *sustainability*.

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Pesisir

Pesatnya pembangunan dan beragamnya permasalahan yang muncul sebagai dampak dari aktivitas pembangunan pariwisata dikawasan pesisir, maka dibutuhkan perubahan arah pembangunan ke arah yang lebih berkelanjutan. Praktik berkelanjutan dalam tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang perlu diterapkan dalam proses pengembangan pariwisata di kawasan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Menurut Dodds (2012), pemangku kepentingan juga harus memahami perannya dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Dodds, 2012). Cengiz *et al.* (2011) menambahkan, permasalahan yang sering muncul terkait perkembangan pariwisata disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran pihak-pihak terkait terhadap pengelolaan pariwisata dan lingkungan, serta modal dan penataan yang kurang terencana.

Hidayati *et al.* (2003) menyatakan, konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memenuhi kriteria-kriteria berikut.

1. Secara ekologis berkelanjutan (*environmentally sustainable*), artinya pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem setempat. Konservasi daerah wisata baru harus diupayakan secara maksimal untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari dampak negatif kegiatan pariwisata.
2. Secara sosial dan kebudayaan dapat diterima (*socially acceptable*), artinya mengacu pada kemampuan masyarakat lokal menyerap usaha pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial. Selain itu, masyarakat lokal juga mampu beradaptasi dengan budaya turis yang berbeda sehingga tidak mengubah budaya asli mereka.
3. Layak secara ekonomi (*economically viable*), artinya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pariwisata di kawasan pesisir merupakan wisata yang memanfaatkan daerah pertemuan antara darat dan laut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya laut ialah 4 mil diukur dari garis pantai ke arah laut untuk kabupaten kota, sedangkan untuk provinsi ialah 12 mil. Wisata pesisir merupakan kegiatan wisata yang berhubungan dengan laut, seperti santai di pantai menikmati alam sekitar, berenang, berperahu, berselancar, menyelam ke dalam laut menikmati terumbu karang, mengunjungi objek purbakala, kapal karam, pesawat tenggelam, serta berburu ikan-ikan laut (Hidayah, 2000).

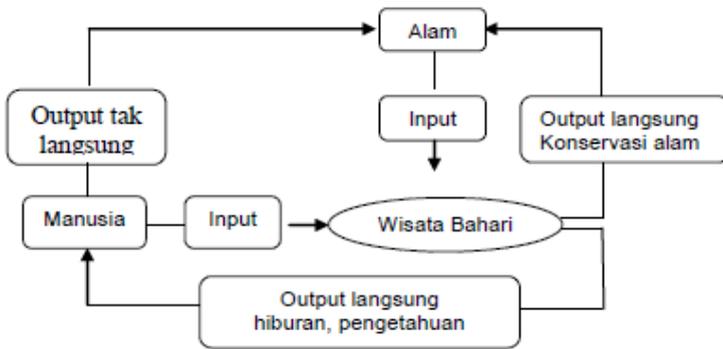
Pelaksanaan wisata pesisir akan berhasil jika memenuhi berbagai komponen yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan alam, kesejahteraan penduduk yang mendiami kawasan pesisir, kepuasan pengunjung yang menikmati dan keterpaduan komunitas dengan area pengembangannya (Nurisyah 2006; Hamdiah 2004). Pembangunan pariwisata di kawasan pesisir diarahkan untuk memanfaatkan jasa-jasa lingkungan ekosistem pesisir dan laut dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah devisa negara. Oleh karena itu, keindahan, kenyamanan, kekayaan, dan keanekaragaman ekosistem pesisir harus dirawat dan dilestarikan.

Menurut Hall (2001), pariwisata di kawasan pesisir merupakan kegiatan wisata santai (*leisure*) dan rekreasi yang dilakukan di kawasan pesisir dan perairannya. Kegiatan wisatanya terdiri dari dua jenis kegiatan. *Pertama*, kegiatan yang berlangsung di pantai, seperti melihat pemandangan, wisata pantai, dan perjalanan di tepi karang. *Kedua*, wisata di perairan laut, seperti menyelam, berenang, dan memancing. Hall (2001) menambahkan, kegiatan wisata pesisir sangat dipengaruhi oleh ekosistem dan lingkungan di kawasan tersebut, seperti adanya pantai berpasir, terumbu karang, mangrove, hingga cagar budaya.

Pariwisata di kawasan pesisir menyediakan kegiatan rekreasi yang telah diminati oleh sekelompok sosial tertentu dalam masyarakat Indonesia maupun dunia. Pariwisata di kawasan pesisir diasosiasikan dengan istilah *Tiga S* (*Sun, Sea, dan Sand*). Artinya, wisata pesisir merupakan jenis wisata yang menyediakan keindahan

dan kenyamanan alami dari kombinasi cahaya matahari, laut, dan pantai berpasir bersih. Selain itu, konsep pariwisata di kawasan pesisir yang berkaitan dengan alam dapat menggugah pengunjung untuk mencintai alam (*back to nature*).

Dalam penyelenggaraannya, wisata pesisir tidak menuntut tersedianya fasilitas akomodasi modern yang dilengkapi dengan peralatan mewah. Pariwisata di kawasan pesisir dilakukan dengan kesederhanaan; memelihara keaslian alam dan lingkungan; memelihara keaslian seni dan budaya; adat istiadat, kebiasaan hidup (*the way of live*); menciptakan ketenangan dan kesunyian; memelihara flora dan fauna sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam sekitarnya (Smith, dalam Rahmadani: 2005).



Gambar 2.1 Skema Konsep Pariwisata Di Kawasan Pesisir

Sumber: Hamdiah (2004)

Menurut Hamdiah (2004), manusia yang menikmati pariwisata di kawasan pesisir akan memperoleh *output* langsung berupa hiburan dan pengetahuan. Sementara itu, *output* langsung bagi alam yaitu adanya insentif yang dikembalikan untuk mengelola kegiatan konservasi alam. Manusia juga akan memperoleh *output* tidak langsung, berupa tumbuhnya kesadaran dalam dirinya (wisatawan) untuk memperhatikan sikap hidup sehari-hari agar kegiatan yang dilakukan tidak berdampak buruk pada alam. Kesadaran ini tumbuh sebagai akibat dari kesan yang mendalam yang diperoleh wisatawan selama berinteraksi secara langsung dengan lingkungan pesisir.

Tujuan pengembangan pariwisata di kawasan pesisir ialah mengembangkan potensi kawasan melalui pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang berdaya saing global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dan budaya. Penyelenggaraan pariwisata di kawasan pesisir yang menerapkan prinsip berkelanjutan akan memberikan keuntungan dan kontribusi pada upaya pelestarian sumber daya alam, serta sensitif terhadap budaya masyarakat lokal.

Wilayah timur Indonesia dalam kondisi aktualnya masih ketinggalan infrastrukturnya dan hampir tidak bisa mengimbangi perkembangan daerah industri di pulau Jawa. Oleh karena itu, wilayah tersebut mencoba menjadikan pariwisata sebagai sektor alternatif sebagai salah satu sumber pendapatan. Hal ini didorong oleh potensi wilayahnya yang masih memiliki tempat-tempat dengan pemandangan alam indah dan cocok untuk pariwisata. Dengan luas wilayah laut yang lebih besar, maka pariwisata di timur Indonesia cenderung berkembang mengarah ke pariwisata bahari yang memanfaatkan wilayah pesisir dan laut. Hal ini terlihat dengan berkembangnya pariwisata di wilayah timur Indonesia, seperti Wakatobi, Raja Ampat, Maluku, serta Bunaken.

UNWTO (2004) mengembangkan indikator untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan, indikator ini dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberlanjutan suatu daerah tujuan wisata, seperti halnya pariwisata di kawasan pesisir. Indikator tersebut meliputi

1. kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan wisata;
2. terlindunginya aset-aset budaya;
3. partisipasi masyarakat;
4. kepuasan wisatawan;
5. jaminan kesehatan dan keselamatan;
6. manfaat ekonomi;
7. perlindungan terhadap aset alam;
8. pengelolaan sumber daya alam yang langka;
9. pembatasan dampak;
10. pengendalian aktivitas wisata;

11. perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tujuan wisata;
12. merancang produk dan jasa; serta
13. keberlanjutan operasi dan layanan wisata.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi patokan dalam pengaturan sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika tercapai dengan tetap menjaga integritas budaya, proses-proses, dan keanekaragaman hayati. Proses pelibatan masyarakat secara aktif maupun pasif harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan. Hal ini akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki yang dapat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata tersebut.

Dodds & Butler (2010) menyatakan, tidaklah mudah menjalankan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan karena terdapat beberapa hambatan yang sering kali menghalangi. Hambatan-hambatan tersebut misalnya dari sisi pemerintah yang lebih memprioritaskan aspek ekonomi daripada aspek sosial dan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pembangunan jangka pendek (sekitar 5 tahun) yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, salah satu caranya dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya daripada mempertimbangkan pembangunan jangka panjang (berkelanjutan) yang setidaknya membutuhkan waktu 10 tahun. Kurun waktu 4-5 tahun tidak akan cukup untuk mencapai tujuan kebijakan pariwisata berkelanjutan.

Berbagai program di tingkat pemerintah sering kali tidak terkoordinasi, pelaksanaan kebijakan dari satu tingkat terkadang bertentangan dengan kebijakan di tingkat lain. Kepentingan ekonomi sering kali melebihi kepentingan lainnya sehingga menyebabkan benturan-benturan di tingkat pemerintah regional ataupun nasional. Partisipasi dari pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, sektor swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan berbagai tingkat pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jika tidak ada keterlibatan dan dukungan terhadap prinsip-prinsip berkelanjutan, maka perumusan kebijakan dan implementasi yang efektif tidak akan muncul dan perubahan tidak

akan terjadi. Dibutuhkan sikap mendukung terhadap lingkungan dan perubahan perilaku. Hal ini lebih mungkin terjadi jika motivasi untuk melakukannya berasal dari masing-masing pribadi dan atas dasar keyakinan diri sendiri.

Menurut Buttler (1999), masalah lainnya yang menghambat keberlanjutan pariwisata ialah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan konsep pariwisata berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi keberlanjutan pariwisata tidaklah mudah karena perlunya pendekatan multisektoral. Bahkan, ketika konsep pariwisata berkelanjutan telah mampu dipahami, tidak menjamin akan dilaksanakan di daerah tujuan wisata. Jika keberlanjutan pariwisata ingin dicapai, maka sangat penting untuk menjamin pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersedia terlibat dalam proses.

Jika industri pada semua lapisan tidak bersedia diajak berpartisipasi untuk melaksanakan prinsip keberlanjutan, maka usaha dari pihak lain yang berkepentingan tidak akan begitu berpengaruh. Jika sektor publik juga tidak mau menegakkan atau menjalankan kebijakan berkelanjutan, maka keberlanjutan pariwisata tidak akan terjadi. Jika masyarakat lokal tidak dapat melihat nilai manfaat untuk jangka panjang seperti halnya untuk jangka pendek, mereka juga tidak memedulikannya. Jika wisatawan tidak dapat menikmati atau merasa tidak puas terhadap bentuk pariwisata yang berlanjut, maka mereka tidak akan berpartisipasi dan tidak akan mengunjungi daerah tujuan wisata yang ditawarkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dodds & Butler (2010) mendukung pandangan ini.

Selain hal di atas, pengembangan pariwisata dikawasan pesisir juga ditentukan perubahan iklim dan lingkungan. Pemanasan global dan perubahan iklim global telah diyakini berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia di berbagai wilayah dunia. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling rentan terkena dampak buruk pemanasan global sebagai akumulasi pengaruh daratan dan lautan.

Dalam ringkasan teknisnya tahun ini, *Intergovernmental Panel on Climate Change*, suatu panel ahli dalam isu perubahan iklim, menyebutkan faktor-faktor penyebab kerentanan wilayah pesisir.

1. *Pertama*, pemanasan global yang dapat meningkatkan frekuensi badai di wilayah pesisir. Setiap tahun, sekitar 120 juta penduduk dunia di wilayah pesisir menghadapi bencana alam tersebut, serta 250 ribu jiwa menjadi korban dalam kurun 20 tahun terakhir (1980-2000). Peneliti bidang meteorologi di Amerika Serikat mencatat adanya peningkatan frekuensi badai tropis di Laut Atlantik dalam seratus tahun terakhir (KCM, 31 Juli 2007). Pada periode 1905-1930, wilayah pantai Teluk Atlantik terjadi rata-rata enam badai tropis per tahun. Rata-rata tahunan itu melonjak hampir dua kali lipat (10 kali badai tropis per tahun) pada periode tahun 1931-1994 dan hampir tiga kali lipat (15 kali badai tropis) mulai tahun 1995 hingga 2005. Pada tahun 2006, dikenal sebagai *tahun tenang* karena masih terjadi 10 badai tropis di wilayah pesisir. Pola peningkatan kejadian badai tropis ini tetap akan berlangsung sepanjang pemanasan global masih terjadi.
2. *Kedua*, pemanasan global diperkirakan akan meningkatkan suhu air laut berkisar antara 1-3°C. Dari sisi biologis, kenaikan suhu air laut berakibat pada meningkatnya potensi kematian dan pemutihan terumbu karang di perairan tropis. Dampak ini diperkirakan mengulang dampak peristiwa *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) tahun 1997-1998. *World Resource Institute* tahun 2002 menyatakan, suhu air laut yang meningkat 1-3°C pada saat itu telah memicu peristiwa pemutihan terumbu karang terbesar sepanjang sejarah.

Hampir sekitar 18% terumbu karang di Asia Tenggara rusak dan hancur. Terjadi kematian sebanyak 90-95% terumbu karang di wilayah perairan Kepulauan Seribu, dua tahun setelah kejadian baru pulih 30%. Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh penduduk Indonesia harus segera mewaspadai hal ini dan menentukan langkah-langkah strategis untuk menanggulangnya. Noronha (dalam Soegiarto, 1991) mengelompokkan kemungkinan dampak kenaikan permukaan air laut menjadi empat bagian berikut.

1. Dampak fisik

Peningkatan kerusakan karena banjir dan gelombang pasang; erosi pantai dan peningkatan sedimentasi; perubahan kecepatan aliran sungai; meningkatnya gelombang laut; serta meningkatnya keamblesan (*subsidence*) tanah.

2. Dampak ekologis

Hilang/berkurangnya wilayah genangan (*wetland*) di kawasan pesisir, intrusi air laut, evaporasi kolam garam, hilang/berkurangnya tanaman pesisir, hilangnya habitat pesisir, berkurangnya lahan yang dapat ditanami, dan hilangnya biomassa nonperdagangan.

3. Dampak sosio-ekonomis

Terpengaruhnya lingkungan pemukiman; kerusakan/hilangnya sarana dan prasarana; kerusakan masyarakat/desa pantai; korban manusia dan harta benda jika terjadi gelombang pasang; perubahan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir; peningkatan biaya asuransi banjir; hilang/berkurangnya daerah rekreasi pesisir; serta meningkatnya biaya penanggulangan banjir.

4. Dampak kelembagaan/hukum

Perubahan batas maritim, penyesuaian peraturan perundang-undangan, perubahan praktik pengelolaan wilayah pesisir, dibentuknya lembaga baru untuk menangani kenaikan paras laut, serta peningkatan pajak.

KAWASAN PESISIR PANTAI TELUK MANADO

Pariwisata terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan. Agar berkelanjutan, pengembangan kawasan pariwisata harus dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan pengembangan kawasan pariwisata harus dikembangkan sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pembangunan di bidang pariwisata menjadi salah satu alternatif solusi untuk menjaga keberlanjutan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan pada pengembangan pariwisata di pesisir teluk Manado. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di pesisir teluk Manado diukur dalam bentuk penelitian kuantitatif berupa kuesioner kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan urutan partisipasi masyarakat: Tahap Informasi, Konsultasi, Kerjasama, Kontrol dan Adaptasi. Hasil identifikasi partisipasi masyarakat yang memenuhi kelima kriteria tersebut kemudian diidentifikasi sebagai kawasan wisata. Hasil identifikasi 3 lokasi wisata teluk Manado yang diteliti (Malalayang, Kawasan Reklamasi dan Bunaken) ditemukan 2 lokasi yang telah memenuhi kriteria pengembangan pariwisata berbasis partisipasi yaitu pantai malalayang dan bunaken. Temuan ini diharapkan dapat memfasilitasi pengambil kebijakan untuk memberikan intervensi bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. (Warouw et al., 2020)

Letak Geografis

Kota Manado terletak di Provinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Kota Manado terletak di antara: 1°30'-1°40' LU dan 124°40'-126°50' BT. Berikut batas-batas Kota Manado secara administratif.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wori (Kabupaten Minahasa Utara) & Teluk Manado.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara) & Kecamatan Pineleng (Kabupaten Minahasa).
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pineleng (Kabupaten Minahasa).
4. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Manado/Laut Sulawesi.

Manado berada pada posisi strategis, dilihat dari perspektif peta dunia letaknya tepat ditengah-tengah. Bagi Indonesia, Manado merupakan kota yang berada di ujung utara. Bagi Asia Pasifik, Manado merupakan kota di tengah jalur strategis transportasi internasional daratan Asia-Australia, serta Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan China. Pesisir Teluk Manado terletak di depan Kota Manado, kawasan tersebut secara ekoregion meliputi 3 kabupaten dan kota yang berada dalam cakupan Taman Nasional Laut Bunaken dan menjadi lokasi konservasi.



Gambar 3.1 Peta Kota Manado dan Sekitarnya

Sumber: RTRW Kota Manado 2011-2031

Kota Manado dapat dikunjungi melalui berbagai jalur transportasi. Ada tiga jalur transportasi utama yang dapat digunakan untuk menuju Kota Manado. *Pertama*, transportasi udara melalui bandara internasional Sam Ratulangi. *Kedua*, transportasi laut melalui pelabuhan muara sungai Tondano atau sering disebut Kuala Jengki. *Ketiga*, transportasi darat melalui terminal Pall 2 untuk mobil-mobil yang datang dari arah utara, serta terminal Karombasan dan Malalayang untuk mobil-mobil yang datang dari arah selatan. Kota ini tidak memiliki transportasi kereta api, transportasi jenis ini masih berupa wacana.

Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1988, luas Kota Manado adalah 157,26 km². Setelah proses reklamasi pantai di kawasan pantai Manado (kawasan Boulevard), luas Kota Manado bertambah seluas ± 67 ha. Secara administratif, Kota Manado terbagi menjadi 11 kecamatan dan 87 kelurahan/desa. Selain itu, terdapat juga 3 wilayah pulau di Kota Manado yang terletak di Kecamatan Bunaken, yaitu Pulau Bunaken, Pulau Siladen dan Pulau Manado Tua.

Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan dan Letak Kantor Pemerintahan Kecamatan

Nama Pulau	Luas (Ha)	Panjang Garis Pantai (M)	Kelurahan/Kecamatan
Manado Tua	1.056,02	12.280	Manado Tua Satu dan Manado Tua Dua Kec. Bunaken
Bunaken	811,21	17.570	Bunaken dan Alung Banua Kec. Bunaken
Siladen	27,95	2.240	Bunaken Kec. Bunaken

Sumber: Kota Manado Dalam Angka 2012

Tabel 3.2 Pulau-Pulau di Wilayah Administrasi Kota Manado

Nama Pulau	Luas (Ha)	Panjang Garis Pantai (M)	Kelurahan/Kecamatan
Manado Tua	1.056,02	12.280	Manado Tua Satu dan Manado Tua Dua Kec. Bunaken
Bunaken	811,21	17.570	Bunaken dan Alung Banua Kec. Bunaken
Siladen	27,95	2.240	Bunaken Kec. Bunaken

Sumber: Manado dalam Angka 2012

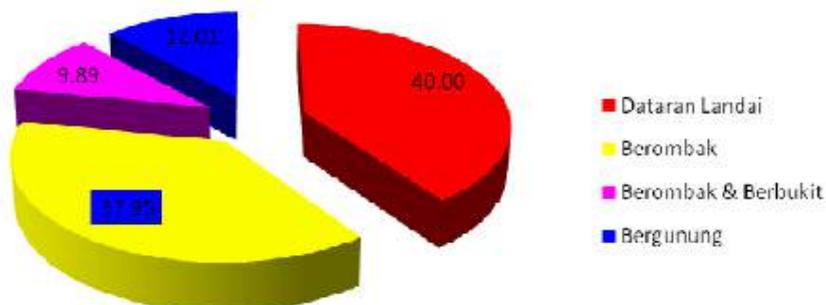
Iklm dan Fisik Alam

Kota Manado memiliki topografi tanah yang bervariasi setiap kecamatan. Secara keseluruhan, keadaan tanah di Kota Manado berombak sebesar 37,95 persen dan dataran landai sebesar 40,16 persen dari luas wilayah. Ketinggian wilayahnya mayoritas berada pada 0-240 m di atas permukaan laut dengan kisaran 95 persen. Hal ini disebabkan karena tekstur alam Kota Manado yang berbatasan dengan pantai dengan kontur tanah yang berombak dan berbukit. Kondisi topografi Kota Manado secara keseluruhan dapat dilihat dalam diagram berikut.

Tabel 3.3 Kondisi Topografi Kota Manado

No	Keadaan Tanah	Kemiringan	Luas	
			HA	%
1.	Dataran Landai	0 – 8 %	6.351,31	40
2.	Berombak	8 – 15 %	5.967,69	37,95
3.	Berombak Berbukit	15 – 40 %	1.554	9,88
4.	Bergunung	> 40 %	1.889	12,01
Jumlah			15.726,00	100

Sumber : Manado dalam Angka 2011



Gambar 3.2 Diagram Topografi Kota Manado

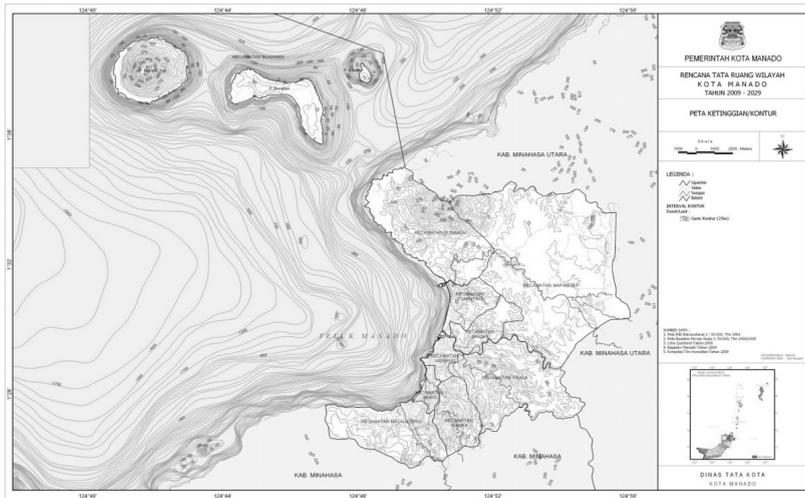
Sumber: Manado dalam Angka 2012

Suhu udara rata-rata di Manado tahun 2010 berkisar antara 25,8°C sampai 27°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kelembapan udara rata-rata bervariasi mulai dari 80 sampai 87 persen. Curah hujan tertinggi tercatat 492 mm dan hari hujan sebanyak 28 hari. Bulan dengan curah hujan tinggi terjadi pada bulan Desember dan curah hujan terendah pada bulan Maret.

Tabel 3.4 Statistik Geografi Kota Manado

Uraian	Satuan	Jumlah (2010)
Luas	Km ²	157,26
Pulau		4
Kecepatan Angin Rata- Rata	Knots	2,0–3,6
Kelembaban Relatif	Persen	80–87
Hari Hujan/Bulan	Hari	13–28
Curah Hujan	Mm	62–492
Suhu Udara Rata-Rata	Celsius	25,5–27
Penyinaran Matahari (%)	Persen	39,5–71,9

Sumber: Manado dalam Angka 2011



Gambar 3.3 Kondisi Topografi Pesisir Teluk Manado

Sumber: RTRW Kota Manado 2011-2031

Morfologis

Karakter Kota Manado dapat dikatakan sangat beragam dengan bentang alam yang mengakomdir unsur-unsur trimatra, yaitu pantai, daratan, dan perbukitan dengan jarak tempuh yang relatif sangat dekat, sekitar 1 km. Dalam perspektif pariwisata, kondisi morfologis kota ini sangat menguntungkan karena dapat menjadi atraksi dan produk pariwisata kota yang sangat komprehensif. Kota Manado juga menjadi muara dari beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai). Terdapat 5 sungai besar yang bermuara, yakni Sungai Tondano, Sungai Tikala, Sungai Sario, Sungai Malalayang, dan Sungai Bailang atau Molas. Selain itu, kota ini juga menjadi muara 20 sungai kecil. Sungai-sungai ini sangat potensial untuk dijadikan pemasok air di Kota Manado sebagai sumber aktivitas budidaya perikanan air tawar. Jika dapat dikendalikan dengan tepat, maka bisa menjadi sumber estetika kota dengan merevitalisasi kawasan sungai menjadi kawasan pariwisata. Di sisi lain, kehadiran sungai-sungai tersebut juga dapat menjadi sumber berbagai masalah kronik di Kota Manado jika tidak ada pengendalian, pengawasan, dan manajemen yang tepat.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kota Manado Tahun 2011

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Malalayang	27.504	28.547	56.051
2.	Sario	11.357	11.867	23.224
3.	Wanea	27.732	29.348	57.080
4.	Wenang	15.873	17.106	32.979
5.	Tikala	14.126	14.317	28.442
6.	Mapanget	26.071	26.648	52.719
7.	Singkil	23.336	23.733	47.069
8.	Tuminting	26.167	26.500	52.667
9.	Bunaken	8.193	8.284	16.477
10.	Bunaken Kepulauan	3.124	3.104	6.228
11.	Paal Dua	21.020	21.158	42.179
JUMLAH/ Total		204.542	210.573	415.115

Sumber: Bappeda Kota Manado (2012)

Sosial Masyarakat

Kota Manado dikenal sebagai daerah yang relatif aman, memiliki letak geografis yang strategis, serta ditempati oleh masyarakat yang rukun dan terdidik. Secara terperinci, berikut penjelasan mengenai keadaan sosial masyarakat Kota Manado.

1. Mata pencarian

Sebagai kawasan pantai, nelayan menjadi mata pencarian mayoritas masyarakat Kota Manado. Selain itu, masyarakat Kota Manado banyak bergantung terhadap sektor industri jasa, perdagangan, serta pariwisata. Pengembangan pariwisata terlihat jelas dengan semakin berkembangnya Kota Manado melalui visi *Manado Kota Model Ekowisata*. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk mempromosikan visi tersebut ialah dengan mengembangkan berbagai kawasan di Kota Manado sebagai pusat MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*).

2. Agama dan kepercayaan

Penduduk Kota Manado memeluk agama Kristen sebanyak 76,10%; Islam 17,52%; Buddha 0,63%; dan Hindu 0,01%.

3. Adat istiadat

Pola adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat Kota Manado merupakan perpaduan pola budaya Minahasa (daratan) dan Sangihe (lautan) yang bercampur dengan budaya dari luar, seperti Belanda. Kebiasaan yang masih kental seperti arisan, karang taruna, pertemuan warga tingkat kelurahan, dan saling mengunjungi rumah tetangga. Selain itu, tradisi gotong royong juga masih berjalan, dapat ditemukan ketika pembangunan sarana dan prasarana umum dan perbaikan atau pembangunan rumah penduduk (*mapalus*).

4. Sosial Budaya

Adanya kegiatan-kegiatan budaya yang terus hidup, seperti gotong royong atau kegiatan lainnya yang menjadikan masyarakat berkumpul juga merupakan salah satu potensi. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut berpotensi dalam upaya pengembangan pariwisata berbasiskan partisipasi masyarakat. Dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mereka, diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan. Potensi internal sosial budaya masyarakat juga dapat menunjang kegiatan ekowisata, seperti kerukunan, keamanan, dan keramahan masyarakatnya.

Ekosistem

1. Hutan mangrove

Hutan mangrove merupakan bentuk hutan tropis di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landai. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang alirannya banyak mengandung lumpur. Menurut Scura *et al.* (1992), hutan mangrove merupakan habitat yang memiliki produktivitas tertinggi di antara habitat lain di wilayah pesisir. Karakteristik hutan mangrove di antaranya sebagai berikut.

- a. Tumbuh optimal di daerah pesisir, tepatnya di muara sungai dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Di daerah tropis dan subtropis dapat ditemui di zona *intertidal* dan *supratidal* yang cukup mendapat aliran air tawar. Jika di pantai-pantai, maka banyak ditemui di tempat yang terlindung dari aktivitas gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat.
 - b. Hutan mangrove memiliki arti penting dalam ekosistem perairan karena menyumbangkan bahan organik bagi perairan di sekitarnya.
 - c. Perakaran mangrove mampu meredam pengaruh gelombang, menahan lumpur, dan melindungi pantai dari erosi, gelombang pasang, dan angin topan.
 - d. Hutan mangrove merupakan daerah asuhan (*nursery ground*) dan pemijahan (*spawning ground*) hewan perairan, seperti udang, ikan, dan kerang-kerangan.
2. Terumbu karang

Menurut Nybakken (1988), terumbu karang merupakan endapan-endapan masif dari kalsium karbonat (CaCO_3) yang dihasilkan oleh karang *scleractinia* (filum *Cnidaria*, kelas *Anthozoa*, ordo *Madreporaria*) dengan sedikit tumbuhan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Suharsono (1988) menambahkan, penggambaran kondisi terumbu karang dilakukan dengan menyajikan suatu struktur komunitas yang terdiri dari data persentase tutupan karang hidup, persentase tutupan karang mati, jumlah marga, jumlah jenis, jumlah koloni, kelimpahan, frekuensi kehadiran, bentuk pertumbuhan dan indeks keanekaragaman jenis.

Menurut Nybakken (1998), parameter-parameter lingkungan berikut sangat menentukan kehidupan terumbu karang.

- a. Suhu

Terumbu karang tumbuh secara optimal pada suhu 23-25°C dan dapat menoleransi suhu sampai 36-40°C, tetapi tidak dapat hidup pada suhu minimum tahunan di bawah 18°C.

- b. Kedalaman
Terumbu karang dapat tumbuh di kedalaman 25 meter dan tidak dapat berkembang di perairan yang lebih dalam dari 50-70 meter. Kedalaman berhubungan erat dengan cahaya matahari yang dapat masuk ke perairan.
 - c. Cahaya
Cahaya menjadi faktor pembatas kehidupan terumbu karang karena dibutuhkan oleh *zooxanthella* dalam melakukan fotosintesis. Fotosintesis akan berkurang jika tidak ada cahaya dan kemampuan karang menghasilkan kalsium karbonat untuk membentuk terumbu juga berkurang.
 - d. Salinitas
Karang hanya dapat hidup pada salinitas normal air laut yaitu pada kisaran 32-35%. Jika lebih/kurang dari kisaran salinitas tersebut, pertumbuhan karang dapat terganggu dan dapat mengakibatkan kematian hewan karang.
 - e. Pengendapan
Endapan sedimen akan menutupi dan menyumbat struktur pemberian makan karang dan menghalangi masuknya cahaya matahari ke perairan.
 - f. Gelombang
Gelombang atau arus memungkinkan terjadinya pengendapan di terumbu karang yang menyebabkan suplai plankton dan air segar kaya oksigen menjadi berkurang.
3. Padang Lamun
- Padang lamun (*seagrass*) merupakan tumbuhan berbunga yang beradaptasi hidup terbenam dalam laut. Tumbuhan ini terdiri dari akar, daun, dan tangkai-tangkai merayap (*rhizome*). Padang lamun memiliki karakteristik-karakteristik berikut.
- a. Lamun hidup di perairan dangkal yang berpasir ataupun di terumbu karang. Pada tempat yang terlindung, lamun berkembang dengan baik dan menutupi suatu kawasan yang luas sehingga membentuk padang lamun.
 - b. Secara ekologis memiliki fungsi penting bagi daerah pesisir,

yaitu: (1) sumber utama produktivitas primer, (2) sumber makanan bagi organisme, (3) penstabil dasar yang lunak, (4) tempat berlindung organisme, (5) tempat pembesaran beberapa spesies, (6) peredam arus, dan (7) menjadi tudung pelindung sinar panas matahari bagi penghuninya.

4. Pantai

Pantai berbatu (*rocky beach*) merupakan pantai yang tersusun oleh batuan induk keras, seperti batuan beku atau sedimen keras dengan karakteristik memiliki komunitas biota yang jauh lebih kompleks. Sementara itu, *beach* merupakan pantai yang tersusun oleh material lepas. Pantai tipe *beash* dibedakan menjadi beberapa jenis berikut.

- a. Pantai pasir (*sandy beach*), yaitu pantai yang tersusun dari endapan pasir kuarsa sisa-sisa pelapukan batu gunung. Menurut Dahuri *et al.* (1996), pantai pasir dibatasi hanya di daerah dengan gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan. Parameter lingkungan yang berpengaruh di pantai pasir adalah pola arus yang mengangkut pasir halus; gelombang yang melepaskan energinya ke pantai; serta angin yang menerbangkan pasir halus kering dan memindahkannya ke tempat lain.
- b. Pantai gravel (*gravelly beach*), yaitu pantai yang tersusun dari gravel atau batuan lepas, seperti kerakal.
- c. Pantai bervegetasi, yaitu pantai yang ditumbuhi oleh vegetasi pantai. Parameter lingkungan utama yang memengaruhi ialah fenomena pasang dan gelombang.

Pantai juga dapat diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria yaitu proses pembentukan dan morfologi.

- a. Berdasar proses pembentukan, pantai dapat dibedakan menjadi tiga jenis berikut.
 - 1) Pantai hasil proses erosi, yaitu pantai yang terbentuk melalui proses erosi yang terjadi di pantai, contohnya pantai batu (*rocky shore*).
 - 2) Pantai hasil proses sedimentasi, yaitu pantai yang terbentuk karena adanya proses sedimentasi yang bekerja di pantai, contohnya *sandy beach* dan *gravelly beach*.

- 3) Pantai hasil aktivitas organism, yaitu pantai yang terbentuk karena aktivitas organisme tumbuhan yang tumbuh di pantai, contohnya pantai mangrove.
- b. Berdasarkan ciri morfologi, pantai dapat dibedakan menjadi jenis-jenis berikut.
- 1) Pantai bertebing (*cliffed coast*), yaitu pantai yang memiliki tebing vertikal. Keberadaan tebing ini menunjukkan bahwa pantai dalam kondisi erosional. Tebing yang terbentuk dapat berupa tebing di batuan induk maupun di endapan pasir.
 - 2) Pantai berlereng (*non-cliffed coast*), yaitu pantai dengan lereng pantai berpasir.

Kondisi Lingkungan

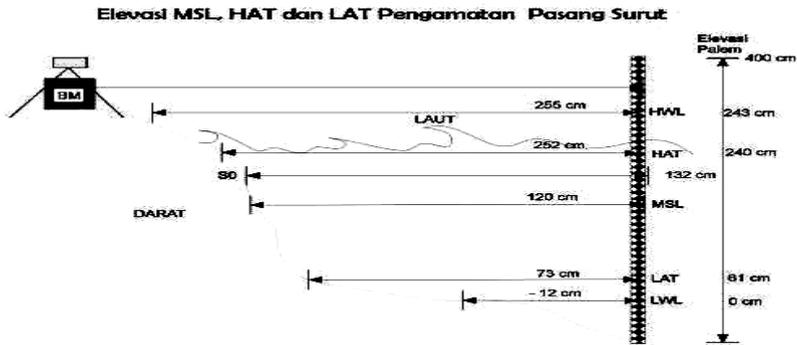
1. Angin dan gelombang

Kecepatan angin yang dipakai dalam peramalan gelombang didapatkan dari pencatatan angin BMKG Winangun tahun 1995-2005. Angin dominan berasal dari arah utara dan selatan. Persentase kecepatan angin terbesar >22 knot adalah 3,1%. Tinggi gelombang sangat dipengaruhi oleh besarnya kecepatan angin dan panjang *fetch* daerah yang ditinjau. Dengan peramalan menggunakan metode Sverdrup *Munk Bretschneider* (SMB), dihasilkan tinggi gelombang yang terjadi di Teluk Sulawesi berkisar antara 2 cm sampai 350 cm (3,5 m). Tinggi gelombang yang paling banyak terjadi pada kisaran 25 cm sampai 100 cm. Gelombang dominan terjadi dari arah utara. Gelombang terbesar berdurasi 6 jam terjadi pada bulan Desember, ketinggiannya mencapai 3,5 m dengan periode 7,396 detik dari arah Barat.

2. Pasang surut muka air laut

Fluktuasi gelombang pasang surut yang berlangsung di Teluk Manado relatif seragam di setiap titik pengamatan. Dalam hal ini, data pasang surut yang digunakan ialah hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Pantai Manado Tua dan Bunaken dengan titik pengukuran di Pulau Manado Tua. Namun, untuk memastikan validitas data tersebut, dilakukan pengujian

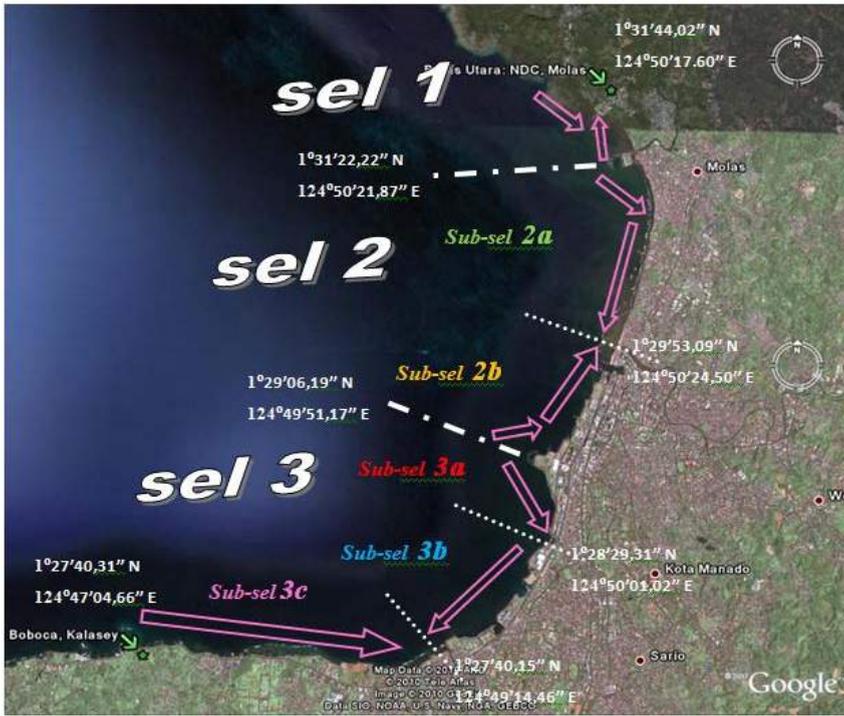
elevasi *Low Water Spring* (LWS) dan *High Water Spring* (HWS) dengan pengukuran pasang surut selama 25 jam saat bulan purnama di pantai Malalayang.



Gambar 3.5 Elevasi Muka Air Laut di Teluk Manado

Untuk mengetahui kondisi elevasi tertinggi dan terendah dalam 10 tahun, maka diperlukan peramalan selama 10 tahun dari rentang waktu pasang surut 30 hari menggunakan metode *admiralty*. Elevasi HWS tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar +2.45 m (+1.25 m dari MSL). Sementara itu, LWS terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar +0.04 m (-1.16 m dari MSL). Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan tipe pasang surutnya yaitu tipe Campuran Semi-Diurnal dengan indeks *Formzhal* 0.35.

Secara garis besar, kondisi lingkungan di kawasan pesisir Teluk Manado akan digambarkan dalam pembagian sel kawasan dibawah ini. Pesisir pantai Teluk Manado terdiri atas berbagai bentuk dan kondisi yang beragam, secara lengkap kawasan pesisir Kota Manado dapat dipahami melalui gambar berikut.



Gambar 3.6 Sistem Sel Eksisting Pesisir Teluk Manado

(Sumber : Penelitian Kondisi Eksisting, Pesisir Teluk Manado Berdasarkan Hasil Kajian Sel Dan Pemodelan Perubahan Garis Pantai; Assa 2011)

Dalam penelitian yang dikembangkan oleh beberapa peneliti (Assa, 2011) ini digambarkan bahwa kawasan pesisir Teluk Manado terbagi atas beberapa sel bagian. Pembagian ini dibagi berdasarkan kondisi pesisir dimulai dari kawasan pesisir di utara molas hingga ke selatan Malalayang. Keseluruhan kawasan pesisir ini merupakan lokasi potensial untuk pariwisata, namun sesuai dengan peruntukan dan tata ruang yang berkembang kawasan pesisir ini berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir itu sendiri.

1. Sel Pantai 1

Kondisi eksisting bagian 1 menunjukkan kawasan pesisir yang masih asli dan belum terjamah akan pembangunan. Kawasan pesisir ini terletak di bagian utara Teluk Manado, memanjang dari sepanjang Kecamatan Molas. Sebagian besar kondisi

pesisir tersebut masih berupa hutan bakau dengan pinggiran pesisir berupa pasir putih.



Gambar 3.7 Kondisi Eksisting Sel Pantai 1 Pesisir Teluk Manado (a) Ikan Nemo, (b) Manado Tua, (c) & (d) Terumbu Karang

Kondisi eksisting digambarkan sebagai berikut.

- Terdapat daerah yang baru direklamasi, menjorok sekitar 60 meter ke laut arah barat daya, di dalam kompleks Barracuda Resort atau NDC Molas.
- Di beberapa titik areal tumbuhnya mangrove terlihat sampah berserakan.
- Letak pemukiman warga berjarak minimal 150 meter dari garis pantai.
- Kondisi mangrove yang ada dalam kondisi baik.
- Kelandaian pantai berkisar di antara 1/50 sampai 1/100 sehingga menyebabkan rentang panjang daerah pasang surut mencapai ± 100 hingga 200 meter.

- f. Terdapat muara Sungai Bailang dengan tipe muara *wave dominated estuary*.
- a. Latar belakang pantai ialah pohon-pohon kelapa, rumah-rumah warga, dan tempat wisata Nusantara Diving Centre (NDC).

Analisis beberapa faktor hidro-oseanografi terhadap sel pantai 1 menunjukkan hal-hal berikut.

- a. Berdasarkan perhitungan *fetch* dengan titik tinjau sel pantai 1, gelombang dominan berasal dari arah barat dengan tinggi gelombang terbesar terjadi pada bulan Desember, setinggi 46.154%. Selain arah barat, terdapat arah lain yang kurang dominan, yakni arah barat laut, barat daya, dan selatan.
- b. Kedalaman dan tinggi gelombang pecah maksimum diakibatkan oleh gelombang arah barat, masing-masing sebesar $db=2,5$ meter dan $Hb=2,25$ meter.
- c. Perkiraan angkutan sedimen sejajar pantai ialah 76.428,51 m^3 /tahun. Sebesar 17.993,29 m^3 /tahun angkutan sedimen dari arah utara dan sebanyak 58.435,22 m^3 /tahun dari arah selatan. Arah angkutan ditandai dengan tanda panah. Angkutan sedimen bulanan terbesar terjadi pada bulan Desember, sedangkan terkecil terjadi pada bulan April.
- d. Angkutan sedimen tegak lurus pantai dari arah barat daya sebesar 1.125.148,78 m^3 /tahun meninggalkan pantai. Angkutan sedimen terbesar terjadi pada bulan Desember, dan terkecil pada bulan Mei.
- e. Melihat jumlah perkiraan angkutan sedimen per tahun antara angkutan sejajar pantai dan angkutan tegak lurus pantai, disimpulkan kondisi pantai pada sel pantai 1 cenderung tererosi.

2. Sel Pantai 2

Kondisi eksisting sel pantai 2 merupakan kawasan pesisir di Kecamatan Tuminting atau bagian utara dari muara sungai Tondano. Muara Sungai Tondano merupakan lokasi pelabuhan Manado. Sel pantai 2 memanjang dari pelabuhan ikan Tuminting sampai Kawasan Mega Mas. Panjang daerah

tinjauan untuk Sel Pantai 2 adalah ± 4700 meter. Analisis hidro-oseanografi diperoleh hasil sebagai berikut.

- a. Gelombang maksimum berasal dari arah barat pada bulan Desember (25.625%). Kondisi tinggi gelombang maksimum hanya berkisar 0.94% dari arah barat laut terjadi pada bulan April dan Oktober setinggi 3,1 meter.
- b. Angkutan sedimen sejajar pantai total sel pantai 2 adalah 12180,50 m³/tahun dari arah utara ke selatan akibat pengaruh gelombang arah barat laut, serta -12444,98 m³/tahun dan -13875,77 m³/tahun dari arah selatan akibat gelombang arah barat dan barat daya.
- c. Volume angkutan sedimen tegak lurus pantai total sebanyak 739610,21 m³/tahun menuju pantai.
- d. Cenderung tidak tererosi, tetapi berpotensi abrasi meskipun sepanjang sel telah dibangun *sea wall* pengaman jalan boulevard.

Sel pantai 2 ini secara morfologis dibagi menjadi 2 sub-sel, yakni sub-sel 2-A dan sub-sel 2-B yang dipisahkan oleh muara Sungai Tondano. Morfologi pantai pada sub-sel 2-A tergolong pantai berpasir hitam. Panjang daerah pesisir pantai di sub-sel 2-A ini adalah ± 2750 m, memanjang dari Pelabuhan ikan Tuminting (Sungai Paniki) sampai di muara Sungai Tondano. Berikut kondisi eksisting sub-sel 2-A.

- a. Berm pantai agak curam dan di atasnya berdiri pemukiman warga.
- b. Cenderung berisiko terabrasi oleh gelombang pasang atau *storm surge*.
- c. Bentuk garis pantai agak melengkung, tetapi cenderung rata.
- d. Latar belakang pantai adalah daerah pemukiman warga, jalan raya Boulevard II, dan juga pelabuhan ikan.
- e. Tidak begitu jauh dari pesisir pantai terdapat rumah ibadah dan perkantoran pemerintah.
- f. Pantai tempat bermuaranya Sungai Tondano. Tipe muara adalah *wave dominated estuary* dengan kondisi angkutan sedimen sungai cukup tinggi sehingga berpotensi sebagai

penyebab pendangkalan pelabuhan Manado.



Gambar 3.8 Kondisi Eksisting Sel Pantai 2A Pesisir Teluk Manado
(a) Ikan Nemo, (b) Manado Tua, (c) & (d) Terumbu Karang

Kondisi gelombang terefraksi berdasarkan analisis yang dilakukan pada sub-sel pantai 2-A sebagai berikut.

- Kedalaman dan tinggi gelombang pecah maksimum akibat gelombang dari arah barat laut, yaitu masing-masing sebesar, $d_b = 0,85$ m dan $H_b = 1,25$ m.
- Volume angkutan sedimen sejajar pantai dari arah utara ke selatan akibat gelombang arah barat laut sebesar $16989,65$ m^3 /tahun, serta akibat gelombang arah barat daya sebesar $13875,77$ m^3 /tahun. Total angkutan sedimen sejajar pantai pada sub-sel 2-A sebesar $30865,42$ m^3 /tahun. Angkutan sedimen maksimum terjadi pada bulan Desember.
- Volume angkutan sedimen tegak lurus pantai akibat pengaruh gelombang arah barat sebesar $739610,21$ m^3 /tahun atau $0,28087$ m^3 /detik menuju pantai. Berdasarkan data angkutan sedimen dapat disimpulkan bahwa pantai cenderung tidak

tererosi, tetapi berpotensi abrasi karena tinggi gelombang laut yang besar pada musim badai.

Kondisi eksisting sel bagian 2 B merupakan kawasan pesisir di Kecamatan Wenang atau bagian selatan dari muara sungai Tondano, salah satu sungai besar yang membelah kota Manado dan bermuara di Teluk Manado. Muara sungai Tondano ini juga merupakan lokasi pelabuhan Manado.

Panjang daerah pesisir pantai di sub-sel 2-B ini adalah \pm 1890 meter dari Sungai Tondano sampai Kawasan Mega Mas. Morfologi pantai pada sub-sel 2-B tergolong pantai berpasir, tetapi sebagian besar daerah pesisir pantainya telah direklamasi. Kondisi eksisting sel ini sebagai berikut.

- a. Pantai berpasir halus berwarna kecoklatan yang dipengaruhi oleh angkutan sedimen Sungai Tondano.
- b. Berm pantai agak curam.
- c. Bentuk memanjang pantai cenderung lurus.
- d. Di bagian utara terdapat pelabuhan Manado yang bersisian dengan Sungai Tondano.
- e. Ada dermaga kecil di kawasan Marina Plaza dan Kawasan Mega Mas, serta terdapat dermaga besar di daerah Pelabuhan Manado.
- f. Terdapat wisata kuliner maupun perkantoran swasta di pesisir pantai yang telah direklamasi.
- g. Daerah reklamasi dilindungi dengan *sea wall* batu pecah.



Gambar 3.9 Kondisi Eksisting Sel Pantai 2B Pesisir Teluk Manado
 (a) Ikan Nemo, (b) Manado Tua, (c) & (d) Terumbu Karang

Sementara itu, kondisi gelombang terefraksi dan angkutan sedimen berdasarkan analisa yang dilakukan pada sub-sel pantai 2-B sebagai berikut.

- a. Kedalaman dan tinggi gelombang pecah maksimum akibat gelombang dari arah barat masing-masing sebesar, $d_b = 1,8$ m dan $H_b = 2,2$ m.
- b. Volume angkutan sedimen sejajar pantai terbesar dari selatan ke utara akibat pengaruh gelombang arah barat laut dan barat, masing-masing sebesar $12180,50 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan $12444,98 \text{ m}^3/\text{tahun}$.
- c. Total angkutan sedimen sejajar pantai pada sub-sel 2-B adalah sebesar $24625,47 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Angkutan sedimen maksimum terjadi pada bulan Desember.

3. Sel Pantai 3

Sel pantai 3 terletak dari Kawasan Mega Mas, tepatnya di belakang Multimart Mega Mas sampai dengan Boboca Kalasey. Panjang daerah tinjauan untuk Sel Pantai 3 adalah ± 7.300

meter. Kondisi eksisting sel bagian 3 merupakan kawasan pesisir di Kecamatan Wenang dan Sario atau bagian selatan dari muara Sungai Tondano, kawasan ini merupakan kawasan reklamasi yang dikuasai oleh pengembangan Megamas.

Pembang Megamas merupakan pengembang pertama yang mendapatkan ijin untuk melakukan reklamasi dengan kawasan yang terluas di antara pengembangan kawasan rekmasi lainnya. Kondisi eksisting menunjukkan hal-hal berikut.

- a. Gelombang maksimum berasal dari arah barat dan arah utara. Panjang *fetch* terbesar dari arah barat Llut yaitu 503.386 km. Gelombang arah barat terjadi pada bulan Desember (28.873%) dan gelombang arah utara terjadi pada bulan Februari (16.197%).
- b. Angkutan sedimen sejajar pantai total pada sel pantai 3 adalah 68010,12 m³/tahun akibat pengaruh gelombang dari arah barat laut dan 26935,39 m³/tahun akibat pengaruh gelombang dari arah barat, serta 21486,59 m³/tahun dari arah utara.
- c. Volume angkutan Sedimen tegak lurus pantai total sebanyak 1655232,59 m³/tahun menuju pantai.

Sel pantai 3 ini dapat dibagi menjadi 3 sub-sel yang dipisahkan oleh Sungai Sario dan Sungai Malalayang, yakni sub-sel 3-A, sub-sel 3-B, dan sub-sel 3-C. Sub-sel 3-A berada di kawasan Mega Mas hingga Sungai Sario, merupakan sub-sel terkecil di Teluk Manado. Panjang pesisir pantainya ± 950 m. Morfologi pantai pada sub-sel ini ialah pantai berpasir, sebagian besar daerah pesisirnya telah direklamasi. Kondisi eksisting sel ini menjelaskan hal-hal berikut.

- a. Berm pantai cukup landai.
- b. Bentuk memanjang pantai melengkung.
- c. Latar belakang pantai adalah jalan raya utama Boulevard.
- d. Di beberapa spot terdapat kompleks wisata kuliner pesisir pantai.
- e. Pesisir pantai masih termasuk kawasan *Bussiness on Boulevard* atau kawasan Mega Mas.



Gambar 3.10 Kondisi Eksisting Sel Pantai 3A di Pesisir Teluk Manado (a) Ikan Nemo, (b) Manado Tua, (c) dan (d) Terumbu Karang

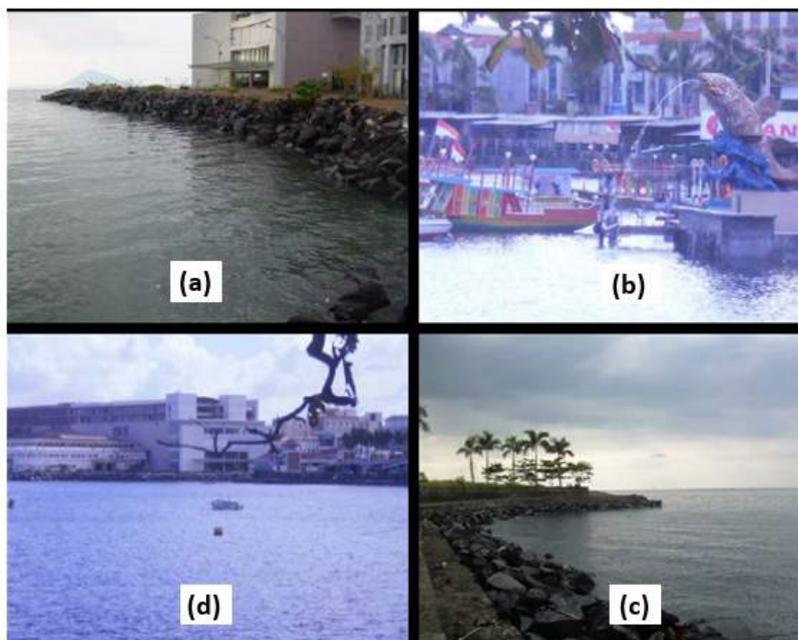
Kondisi gelombang terefraksi dan angkutan sedimen berdasarkan analisa yang dilakukan pada sub-sel pantai 3-A sebagai berikut.

- a. Kedalaman dan tinggi gelombang pecah maksimum diakibatkan oleh gelombang dari arah barat masing-masing sebesar, $db = 1,95 \text{ m}$, $Hb = 2,25 \text{ m}$.
- b. Volume angkutan sedimen sejajar pantai terbesar pada sub-sel 3-A akibat gelombang dari arah barat laut sebesar $13678,92 \text{ m}^3/\text{tahun}$, sedangkan dari arah barat sebesar $-10340,19 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Total angkutan sedimen sejajar pantai pada sub-sel 3-A adalah sebesar $3338,73 \text{ m}^3/\text{tahun}$ ke arah Tenggara. Angkutan sedimen maksimum terjadi pada bulan Desember.

Kondisi eksisting sel bagian 3-B merupakan kawasan pesisir di Kecamatan Sario atau bagian reklamasi yang dikuasai oleh pengembangan Lion Hotel dan Bahu Mall. Secara umum, kawasan ini menjadi salah satu dermaga kapal pesiar Grup Lion, serta merupakan pusat dari kantor penerbangan Batik Air.

Kondisi gelombang terefraksi dan angkutan sedimen berdasarkan analisa yang dilakukan pada sub-sel pantai 3-B sebagai berikut.

- a. Kedalaman dan tinggi gelombang pecah maksimum diakibatkan oleh gelombang dari arah barat masing-masing sebesar, $db = 1,8$ m dan $Hb = 2,1$ m.
- b. Volume angkutan sedimen sejajar pantai terbesar pada sub-sel 3-B akibat gelombang dari arah utara sebesar $21486,59$ m^3 /tahun, sedangkan dari arah barat sebesar $-16595,20$ m^3 /tahun. Total angkutan sedimen sejajar pantai pada sub-sel 3-B adalah sebesar $38081,79$ m^3 /tahun ke barat daya. Angkutan sedimen maksimum terjadi pada bulan Desember.
- c. Volume angkutan Sedimen tegak lurus pantai total adalah sebanyak $587256,49$ m^3 /tahun menuju pantai.



Gambar 3.11 Kondisi Eksisting Sel Pantai 3B di Pesisir Teluk Manado (a) Ikan Nemo, (b) Manado Tua, (c) & (d) Terumbu Karang

Sub-sel 3-C terletak dari Sungai Malalayang sampai Boboca, Kalasey. Sub-sel ini merupakan sub-sel terpanjang di Teluk Manado, yaitu sepanjang ± 4000 m. Kondisi gelombang terefraksi dan angkutan sedimen berdasarkan analisa yang dilakukan pada sub-sel pantai 3-C sebagai berikut.

- a. Kedalaman dan tinggi gelombang pecah maksimum diakibatkan oleh gelombang dari arah barat laut masing-masing sebesar, $db = 0,8$ m dan $Hb = 1,25$ m.
- b. Volume angkutan sedimen sejajar pantai terbesar pada sub-sel 3-C akibat gelombang dari arah barat laut sebesar $54331,8$ m^3 /tahun.
- c. Angkutan sedimen maksimum terjadi pada bulan Desember.
- d. Volume angkutan sedimen tegak lurus pantai total adalah sebanyak $1067976,1$ m^3 /tahun menuju pantai.

Kondisi eksisting sel bagian 3-C merupakan kawasan pesisir di Kecamatan Malalayang yang belum tersentuh dengan reklamasi. Jika eksisting kawasan sebelumnya merupakan kawasan yang sebagian besar telah dikelola oleh pihak swasta, maka kawasan pesisir Malalayang ini merupakan kawasan milik masyarakat secara utuh.



Gambar 3.12 Kondisi Eksisting Sel Pantai 3C di Pesisir Teluk Manado (a) Ikan Nemo, (b) Manado Tua, (c) & (d) Terumbu Karang

Kondisi Pariwisata

1. Latar belakang pengembangan pariwisata di Teluk Manado.

Kota Manado berada di ujung utara Kepulauan Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, wilayah ini diprediksi akan menjadi kawasan perdagangan internasional. Kawasan pesisir Teluk Manado berkembang sebagai kawasan pariwisata yang identik dengan sebutan *Water Front City*. Kawasan ini juga merupakan kawasan penyangga Taman Nasional Laut Bunaken.

Taman Nasional Laut Bunaken merupakan salah satu zona inti segitiga karang dunia. Kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 730/Kpts-II/1991, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1991. Kawasan seluas 89.065 ha ini meliputi 5 pulau terkenal, yaitu Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage, dan Nain. Daerah

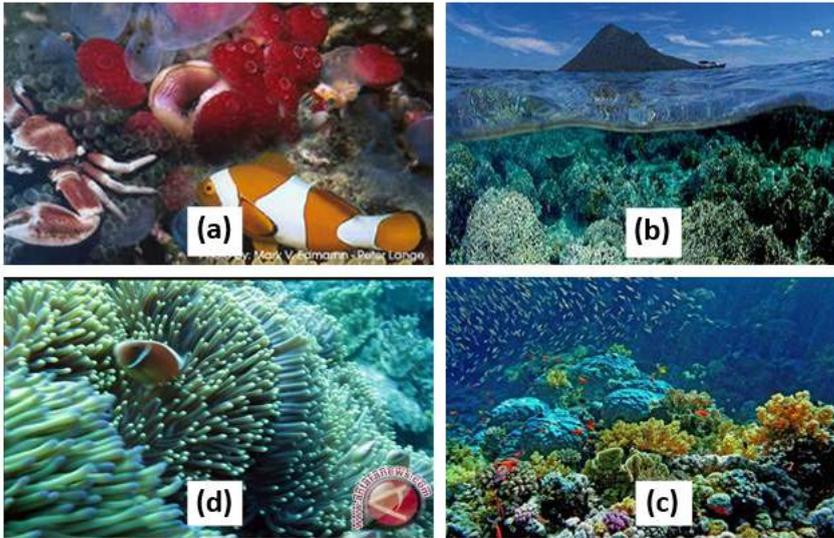
pesisir utara terdiri dari Molas, Meras, Tongkeina, dan Tiwoho. Sementara itu, daerah pesisir selatan terdiri dari Poopoh sampai Popareng. Terdapat juga 21 desa/kelurahan lintas kabupaten dan kota, antara lain Desa Malalayang dan Kalasey.

Perkembangan pesisir Teluk Manado tidak lepas dari permasalahan pengembangan kota, seperti munculnya kawasan kumuh yang berkembang di sepanjang pesisir Kota Manado. Munculnya permasalahan tersebut merupakan ide awal lahirnya gagasan pembangunan kota dengan memperhatikan estetika. Pengembangan kota cenderung menekankan wilayah pesisir dan keberadaan laut sebagai tempat pembuangan, bukan wilayah yang memiliki nilai estetika.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di Kota Manado semakin membutuhkan ruang yang tinggi. Kebutuhan ruang berimbang terhadap meningkatnya tekanan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut. Tekanan tersebut kemudian berubah menjadi kebijakan pembangunan yang semakin tidak teratur.

Visi “Kota Pariwisata” pemerintah Kota Manado belum menjadi solusi yang sesuai harapan sehingga perlu terus melakukan evaluasi. Kota Manado belum bisa disebut sebagai kota pariwisata karena kondisi fisik tata ruangnya belum tertata sesuai kawasan kepariwisataan. Peran pemerintah menyangkut pengembangan kota pariwisata belum sepenuhnya terlaksana.

Manado tidak memiliki sumber daya alam hasil bumi, seperti bahan baku fosil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Kekayaan alam yang dimiliki Kota Manado berupa keindahan alam, pemandangan, serta terumbu karang di sepanjang pesisir pantai. Apabila kondisi ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi yang dapat diandalkan dari sektor industri pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata merupakan alternative yang tepat untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Manado.



Gambar 3.14 (a) Ikan Nemo, (b) Manado Tua, (c) dan (d) Terumbu Karang di Teluk Manado

Sumber: bunaken.org; wisataindonesia.org; satulayan.net; antaranews.com

2. Maksud dan tujuan pengembangan pariwisata di Teluk Manado.

Potensi sumber daya di kawasan pesisir Teluk Manado terdiri dari sumber daya yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Di antara sumber daya tersebut, terdapat beberapa yang dikategorikan sebagai objek dan daya tarik wisata, seperti pesisir, reklamasi, mangrove, terumbu karang, air laut, hamparan pasir putih, dan vegetasi pantai. Sumber daya tersebut berperan penting dalam menunjang kegiatan pariwisata di kawasan pesisir maupun di pulau-pulau kecil.

Saat ini, kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik relatif meningkat. Industri pariwisata memiliki *multiplier effect* yang tinggi, potensial menarik investasi, dan prospektif dikembangkan di Sulawesi Utara. Mantan Gubernur Sulawesi Utara, Sondakh (2000), mengungkapkan pentingnya Taman Nasional Bunaken untuk Sulawesi Utara. Pelestarian kontribusinya terhadap perekonomian dapat dilakukan melalui

pengembangan sektor pariwisata dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi melalui manajemen pengelolaan yang saling menguntungkan. khas sulawesi utara maupun makanan olahan dari luar.

3. Kondisi awal pengembangan pariwisata di Teluk Manado.

Pariwisata kawasan pesisir Teluk Manado awalnya berkembang karena Taman Nasional Laut Bunaken telah menjadi primadona wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya wisatawan yang tertarik terhadap wisata bawah laut. Madjowa (2009) menuliskan, kehidupan masyarakat di kawasan Bunaken berjalan normal hingga akhir tahun 1970 sebelum ditetapkan sebagai lokasi penyelaman bawah laut terindah di dunia.

Pada saat itu, instruktur selam Ricky Lasut dan Locky Herlambang yang mengawali penyelaman di kawasan Bunaken. Sementara itu, survei kawasan Bunaken sebagai objek wisata bawah laut dilakukan PT. Ida Cipta pada tahun 1978. Setahun kemudian, Pangeran Bernhard dari Kerajaan Belanda berkunjung ke Pulau Bunaken. Setelah itu, kawasan ini mulai dikenal sebagai objek wisata bawah laut yang terindah di dunia.

Penginapan sementara untuk wisatawan yang ingin menyelam di Bunaken mulai dibangun di Pantai Malalayang, Manado, tahun 1978. Usaha wisata ini dikerjakan oleh Kelompok Tirta Satwa. Hingga tahun 1981, belum ada penginapan yang dibangun di Bunaken. Semua turis yang ingin ke Bunaken, tetap bermalam di Manado.

4. Kondisi terkini pengembangan pariwisata di Teluk Manado.

Kondisi lingkungan dan penggunaan lahan di Kota Manado menggambarkan campuran antara fungsi lahan perkotaan dan pesisir laut. Sebagai kota yang berada dalam kawasan *ring of fire*, laut dan pesisir Teluk Manado sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Di satu sisi terdapat aktivitas industri dan perdagangan dari sisi ekonomi, di sisi lain terdapat laut sebagai beranda depan kawasan tersebut. Percampuran dua fungsi lahan yang kontras tersebut dapat menjadi potensi bagi

pengembangan Kota Manado dengan berbasis pengelolaan ekowisata.

Selain itu, pergeseran fungsi lahan dari perkebunan menjadi pemukiman menunjukkan bahwa Kota Manado terus berkembang. Hadirnya hotel bertaraf internasional juga menjadi ciri khas Kota Manado saat ini, seperti Gran Kawanua Hotel, Aryaduta Hotel, Swiss Bell Hotel Maleosan, serta rencana pengembangan Hard Rock Hotel di kawasan pesisir Malalayang. Sampai saat ini, pariwisata yang berkembang di Kota Manado tidak difokuskan pada satu tempat saja, tetapi di beberapa tempat sesuai dengan potensi wisata yang dimiliki masing-masing kawasan. Untuk ekowisata, maka pusat utama pengembangan berada di pesisir dan Taman Nasional Laut Bunaken.



Gambar 3.15 Peta Segitiga Karang Dunia yang Berpusat di Manado

Sumber: Dokumen CTI Summit

Aliran sungai yang membelah Kota Manado belum berfungsi sebagai zona wisata. Sungai dan saluran irigasi tersebut menjadi kawasan kumuh dan kotor. Padahal, pesisir Teluk Manado merupakan surga bagi terumbu karang dan menjadi lokasi penyelaman yang dikenal luas di berbagai belahan dunia. Tutupan karang hidup tercantum di wilayah sekitar Pulau Bunaken, pesisir

Malalayang, hingga Awontulap.

Peran taman nasional laut sangat penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Terumbu karang diyakini dapat menjadi sumber oksigen karena mampu mengikat CO₂ di udara. Melalui program pelestarian terumbu karang, maka pemanasan global dapat diperlambat. Namun, benturan kepentingan antara Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara terjadi setelah diterbitkan SK (Surat Keputusan) menyangkut keberadaan Taman Nasional Laut Bunaken. Apabila Taman Nasional Laut Bunaken menjadi cagar alam, maka tidak diperbolehkan ada kegiatan wisata di tempat itu. Akhirnya, Menteri Kehutanan menetapkan Pulau Bunaken dan sekitarnya sebagai taman nasional melalui SK Nomor 730/Kpts-II/91, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1991.

Dengan perubahan status dan fungsi, bukan berarti lokasi kawasan konservasi dan pariwisata Taman Nasional Laut Bunaken berjalan dengan lancar. Antara pemerintah daerah dan Departemen Kehutanan masih terjadi tarik-menarik. Pemerintah Daerah menginginkan Bunaken sebagai kawasan wisata saja. Hal ini tetap berlangsung meskipun krisis ekonomi dan moneter terjadi tahun 1997.

Krisis multidimensi membawa pengaruh yang besar dalam kawasan Bunaken. Kegiatan pengeboman dan peracunan ikan terjadi di beberapa tempat di kawasan ini. Sejak menjadi kawasan taman nasional, Bunaken banyak menimbulkan kontroversi dalam pengelolaannya. Kawasan yang banyak menarik wisatawan asing untuk melakukan rekreasi bawah laut ini diperebutkan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dan Departemen Kehutanan. Seiring dengan otonomi daerah, maka pengelolaan kawasan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Salah satu hambatan yang sangat mendasar ialah belum adanya peraturan daerah pariwisata karena belum disahkannya peraturan daerah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Tanpa RTRW, pemerintah tidak memiliki dasar untuk melakukan penataan ruang wilayah. Selain itu, ada hambatan koordinasi yang tumpang tindih antarsektor. Lokasi Bunaken ditetapkan

sebagai Taman Nasional sehingga otomatis berada di bawah pengawasan Departemen Kehutanan. Ketika pemerintah daerah ingin mengambil inisiatif dalam upaya pengembangan pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, maka akan mengalami hambatan karena masih adanya kewenangan pusat yang belum diserahkan ke daerah.

Faktor Pendorong Pengembangan Pariwisata di Pesisir Pantai Teluk Manado

1. Faktor kondisi objektif adanya potensi Taman Laut Bunaken.

Pariwisata di Kota Manado telah mendapatkan tempat di hati pencinta olahraga selam dan penikmat wisata alam. Hal ini dikarenakan Kota Manado memiliki potensi ekowisata berupa taman laut yang indah, khususnya di kawasan pesisirnya.

Selama ini banyak masyarakat memahami bahwa yang mendorong terjadinya pengembangan pariwisata pesisir Teluk Manado ialah adanya potensinya Taman Laut Bunaken. Padahal, pengembangan pariwisata itu telah terjadi beberapa waktu yang lalu sebelum adanya reklamasi pantai. Kawasan pesisir Teluk Manado direklamasi karena semakin tergerusnya kawasan pantai akibat dari arus laut yang sering melanda kawasan ini. Walaupun reklamasi ditentang oleh berbagai kalangan, tetapi dalam pembangunan memang harus ada yang dikorbankan.

2. Faktor sosiologis dan budaya masyarakat Kota Manado.

Realitas sosial masyarakat di Kota Manado telah memahami potensi pariwisata dalam keseharian aktivitas kehidupan mereka, mengingat bahwa potensi Taman Nasional Laut Bunaken sudah sejak lama dikenal dunia. Taman Nasional Laut Bunaken merupakan surga bagi para *divers*, meskipun pada saat itu bisnis pariwisata belum dikembangkan. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan keterbukaan informasi saat ini, bisnis pariwisata telah menjadi salah satu fokus pembangunan. Hal ini berimbas terhadap semakin dikenalnya kawasan yang menawarkan pesona keindahan alam, termasuk di dalamnya Taman Laut Bunaken.

Kondisi budaya masyarakat Kota Manado merupakan perpaduan antara budaya Minahasa, Sangihe, dan Mongondouw yang kemudian berbaur di Kota Manado. Hal ini menjadikan orang Manado sangat terbuka dalam menerima kunjungan tamu, mengingat daerah pesisir Kota Manado juga merupakan kawasan perdagangan.

3. Faktor pengetahuan terhadap pengembangan pariwisata.

Sebagai salah satu tempat tujuan pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata di Kota Manado harus di bangun sesuai dengan kaidah keberlanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar kawasan pariwisata tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Pengetahuan masyarakat mengenai pariwisata berkembang seiring dengan semakin banyaknya pengunjung di Pulau Bunaken dan semakin dikenalnya Taman Nasional Laut Bunaken.

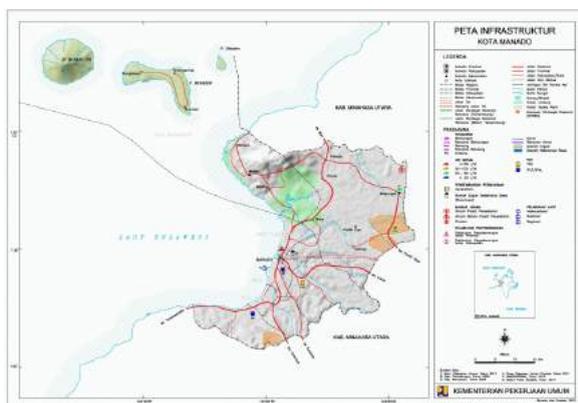
4. Faktor politik pemerintahan.

Pemerintah terus mengembangkan pariwisata sebagai salah satu potensi penting dalam menambang devisa negara. Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Kota Manado juga terus menyosialisasikan konsep *Manado Kota Model Ekowisata*.

PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR PANTAI TELUK MANADO

Potensi Pariwisata Pesisir Pantai Teluk Manado

Industri pariwisata di Kota Manado semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan di kota Manado terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, wisatawan asing yang berkunjung berjumlah 19.940 dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 32.760 wisatawan. Selain itu, ditandai juga dengan dibangunnya hotel-hotel dan sarana pendukung lainnya. Hotel di Kota Manado berjumlah 96 hotel, terdiri dari 83 Hotel Melati dengan 1.640 kamar dan 14 hotel berbintang dengan 1.105 kamar. Di samping itu, terdapat 140 rumah makan dan 42 restoran.



Gambar 4.1 Peta Sebaran Infrastruktur

Sumber: RTRW Kota Manado 2011-2031

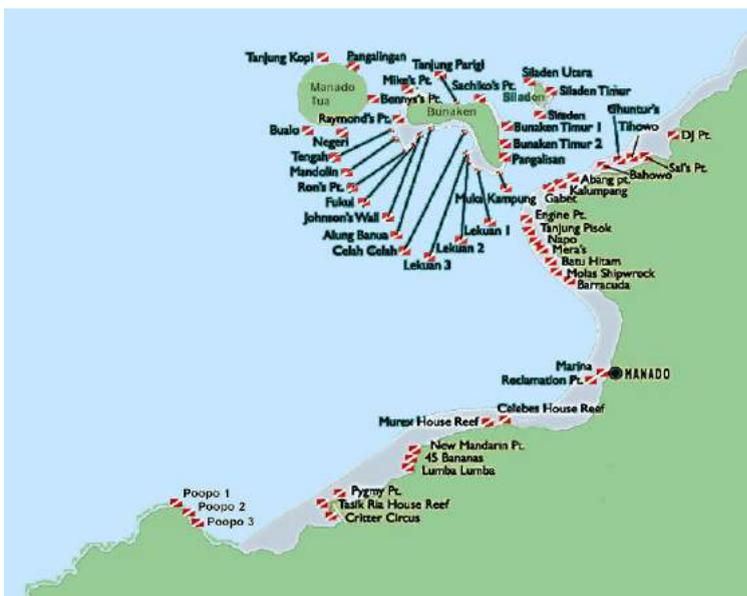
Berdasarkan informasi tentang profil lingkungan pesisir Teluk Manado, maka potensi produk wisata di wilayah ini dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Pariwisata pesisir

Kondisi laut yang belum tercemar dengan terumbu karang dan padang lamun yang bagus, serta keberadaan pulau-pulau kecil yang dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai yang potensial.

a. Selam, parasailing, dan *boating*

Terdapat beberapa lokasi dengan terumbu karang yang cukup bagus, seperti di pesisir Malalayang yang dijadikan sebagai lokasi selam (*dive site*). Selain itu, masih banyak terumbu terbenam yang berada di bawah permukaan air (*submerged reefs*), terumbu ini perlu diinventarisasi dan dikaji kondisinya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensial dijadikan lokasi selam. Selain itu, ada beberapa lokasi padang lamun yang perlu dipromosikan sebagai pelengkap dari atraksi selam di terumbu karang.



Gambar 4.2 Lokasi *Dive Spot* di Pesisir Teluk Manado

Perairan pesisir dangkal di depan hotel saat ini telah dimanfaatkan oleh wisatawan untuk kegiatan parasailing dan *boating*. Kegiatan ini harus ditata agar tidak menimbulkan konflik dengan kegiatan nelayan sekitar yang banyak memasang bubu ketam rajungan di perairan tersebut.

b. Wisata Pulau Bunaken, Manado Tua, dan Siladen

Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Siladen sebagai pulau-pulau kecil memiliki vegetasi yang lebat. Hal yang dapat dilakukan ialah menginventarisasi biologis jenis tanaman dan hewan yang menghuni pulau tersebut, kemudian dijadikan buku panduan lapangan yang dilengkapi foto dan nama dari setiap vegetasi.

c. *Game fishing*

Melimpahnya sumber daya perikanan di sepanjang pesisir Teluk Manado juga dapat dimanfaatkan untuk memancing. Sejak dua tahun terakhir, Dinas Pariwisata Kota Manado mengadakan Lomba Pancing Internasional/Regional di perairan sekitar. Jika lomba ini dapat dikembangkan, maka akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Masyarakat dapat memperoleh pendapatan tambahan dengan menawarkan sewa perahu lokal, sewa pemandu pancing, ataupun menjual makanan dan minuman.

d. Wisata pantai

Pantai pasir putih dengan formasi batu granit, bukit-bukit kecil, dan pohon-pohon kelapa yang tumbuh di lahan pesisir merupakan kombinasi pemandangan yang menawan. Jalan raya mulus yang menyusuri sepanjang pantai, menghubungkan Kota Manado dengan desa-desa pantai hingga Tanawangko, juga menjadi nilai lebih potensi Pantai Malalayang sebagai aset wisata Kota Manado.

e. Hotel dan restoran

Hotel dan restoran di pantai Malalayang, tepatnya di Desa Kalasey sudah relatif berkembang. Penyerapan tenaga lokal yang bekerja di hotel dan restoran tersebut sudah cukup

memadai. Hal yang perlu diwaspadai dari operasi hotel dan restoran ialah pengelolaan limbah padat dan limbah cair. Banyak restoran yang juga mempunyai penginapan dengan lokasi di atas perairan dan kebanyakan membuang limbah cair langsung ke perairan. Dalam jangka pendek, mungkin dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Namun, dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas air dan menimbulkan eutrofikasi, serta ledakan populasi alga yang mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir. Di sisi lain, ternyata sebagian besar hotel dan restoran tersebut tidak lengkap perizinannya, melanggar batas sempadan pantai, dan menutup lahannya dengan pagar sehingga menghalangi nelayan atau masyarakat umum yang ingin mengakses lokasi tersebut.

2. Aktivitas wisata pantai

a. Joging dan bersepeda

Pantai berpasir yang cukup panjang menyediakan peluang dibangunnya *jogging track* di sepanjang pantai untuk wisatawan yang ingin melakukan joging pada pagi atau sore hari.

b. *Camping* dan wisata edukasi

Kondisi alam Pantai Malalayang cukup ideal untuk lokasi perkemahan dalam rangka wisata edukasi bagi pelajar.

c. Ekowisata mangrove

Kawasan pesisir Teluk Manado memiliki dua lokasi hutan mangrove yang relatif bagus untuk dikembangkan, yaitu di kawasan utara dan kawasan selatan teluk Manado. Kawasan selatan memiliki mangrove yang berada di ujung pesisir Malalayang hingga ke arah Tanawangko.

d. Desa wisata

Desa Kalasey yang terletak di Kecamatan Tanawangko merupakan desa yang masih asli khas Melayu. Di desa ini masih dapat ditemukan rumah tradisional dengan kehidupan penduduk dan kondisi lingkungan yang masih asli, asri, dan damai. Rumah penduduk satu dengan lainnya relatif

berjauhan dan berada di tengah-tengah kebun kelapa.

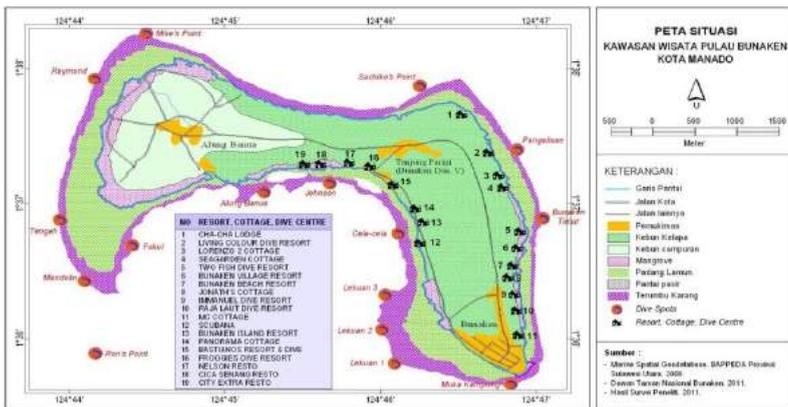
Sementara itu, rumah-rumah yang berada di tepi pantai umumnya berada di atas air. Desa Kalasey bersambungan langsung dengan kawasan pesisir Malalayang sehingga sangat cocok jika dipertahankan keberadaannya untuk dikembangkan sebagai desa wisata.

Perkembangan Pariwisata Pesisir di Pantai Teluk Manado

1. Kawasan Bunaken

Pulau Bunaken merupakan gugus kepulauan bersama dengan Pulau Siladen, Mantehage, dan Manado Tua. Pulau ini memiliki dua kelurahan, yakni Kelurahan Liang dan Alungbanua dengan penduduk sejumlah 3.200 jiwa (Bappeda, 2011).

Kawasan Bunaken secara geografis masuk dalam perairan *Segi Tiga Emas* dengan jumlah habitat lebih dari 3.000 spesies ikan. Perairan *Segi Tiga Emas* merupakan perairan yang menghubungkan Laut Papua, Filipina, dan Indonesia. Pemerintah dan organisasi nonpemerintah tertarik untuk bekerja sama menjalankan program konservasi terumbu karang dan mangrove di kawasan Bunaken. Program konservasi terumbu karang ini bertujuan untuk menjaga ribuan jenis ikan laut dari kepunahan.



Gambar 4.3 Peta Kawasan Pesisir Pulau Bunaken

Sumber: RTRW Kota Manado 2011-2031

Taman Laut Bunaken menarik bagi penyelam karena memiliki 20 titik penyelaman (*diving spot*) dengan kedalaman bervariasi antara 10 meter hingga 1.344 meter. Dari 20 titik penyelaman, terdapat 12 titik selam yang sering dikunjungi penyelam karena mempunyai beragam ikan hias dan terumbu karang yang khas. Di kawasan ini, terdapat dinding karang raksasa yang berjejer cukup panjang (*underwater great walls/hanging walls*). Dinding karang ini menjadi sumber makanan dan tempat berkembang biak ikan-ikan.

a. Awal mula pengembangan pariwisata Bunaken.

Sampai tahun 1970-an, Bunaken hanya sebuah pulau kecil dalam gugusan pulau-pulau di sekitar wilayah Sulawesi Utara yang tidak banyak dikenal orang luar. Saat itu juga, tidak banyak orang yang berminat tinggal di pulau ini karena kesulitan memperoleh sumber air tawar. Hanya ada beberapa nelayan yang menetap untuk mencari ikan di perairan Teluk Manado dan sekitarnya. Nelayan tersebut berasal dari Suku Borgo Manado dan Sanger. Pada saat itu, pulau ini lebih banyak dimanfaatkan para nelayan dari daratan Manado Utara sebagai lokasi persinggahan.

Pada saat itu, seorang ahli biologi ITB (Institut Teknologi Bandung), Locky Herlambang membangun *Nusantara Diving Center* di Desa Kalasey. Sebagai seorang penyelam, Locky bergabung dalam jaringan penyelam dunia. Melalui jaringan tersebut, Locky mempromosikan keindahan alam bawah laut Bunaken. Tidak hanya mempromosikan Bunaken sebagai daerah tujuan wisata bahari, tetapi juga mengupayakan perlindungan terhadap lingkungan di kawasan tersebut.

Akhirnya, pada tahun 1980 kawasan tersebut ditetapkan menjadi Daerah Wisata Laut oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, pada tahun 1986 menjadi Cagar Alam Laut dan pada tahun 1991 menjadi Taman Nasional Kawasan Konservasi. Locky juga menerima Kalpataru dari Presiden RI pada tahun 1991 sebagai penghargaan atas usaha dalam melestarikan Taman Laut Bunaken.

b. Pengembangan pariwisata di Bunaken.

Pada awal perkembangan, wisatawan yang akan menyelam di Bunaken akan menginap di Manado. Setelah itu, mereka menggunakan perahu motor menyeberang ke Pulau Bunaken. Usaha di kawasan Bunaken mulai berkembang dengan hadirnya usaha penyewaan peralatan selam oleh para pemuda lokal. Untuk beberapa waktu, usaha rakyat ini bisa bertahan tanpa persaingan dari investor luar. Namun, situasi berubah setelah ada perubahan peraturan daerah sebagai konsekuensi diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001.

Menyadari besarnya prospek pariwisata di Bunaken, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara berinisiatif mengadakan sosialisasi ke masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengembangkan usaha di kawasan Bunaken. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar perekonomian masyarakat Bunaken tidak hanya tergantung pada hasil laut. Sejak itu, investor lokal maupun asing mulai masuk dan membangun penginapan mewah di Bunaken dan sekitarnya. Saat ini, di kawasan Bunaken sudah memiliki sekitar 20 penginapan dengan kapasitas kamar mencapai hampir 500 buah.

Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Bunaken, terdapat dua permasalahan antara pengusaha dan penduduk lokal. *Pertama*, masyarakat lokal melihat investor pendatang sebagai pesaing yang tidak seimbang dalam hal modal dan jaringan sehingga mengakibatkan masyarakat lokal tersingkir atau terdesak. *Kedua*, penduduk lokal merasa semakin terancam dengan perekrutan tenaga kerja dari luar wilayah Bunaken oleh para investor tersebut. Hal ini merupakan bagian dari proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, jika dibiarkan dan tidak diarahkan akan berujung konflik.

c. Permasalahan pariwisata di Bunaken.

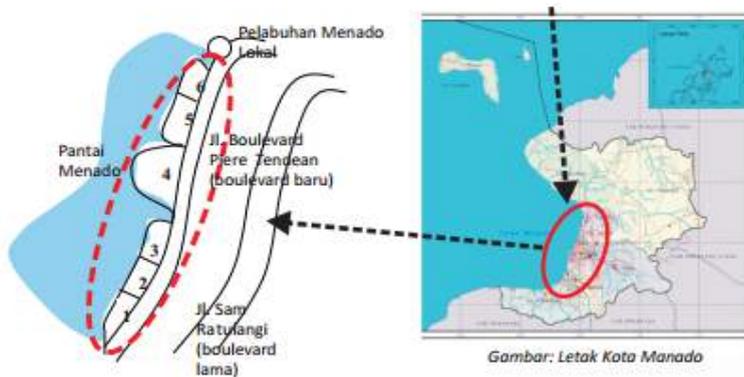
Pengembangan pariwisata di kawasan Bunaken berjalan dengan baik, tetapi juga tidak lepas dari berbagai permasalahan. Masalah pengembangan pariwisata di

kawasan Bunaken terbagi atas 3 masalah pokok berikut.

- 1) Masalah ekonomi, berupa konflik kepentingan antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) dan konflik beda pendapatan. Masalah ini terjadi antara masyarakat dan pengusaha yang mendapatkan izin berusaha dari pemerintah. Konflik ekonomi juga terjadi karena kehadiran investor. Secara umum, masyarakat tidak merasakan dampak pengembangan pariwisata secara signifikan karena tidak ada upaya peningkatan kapasitas kerja oleh para investor luar dan juga pemerintah untuk mereka.
- 2) Masalah sosial, berupa perbedaan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat dan pihak swasta, serta adanya retribusi. Hal ini terjadi karena kehadiran Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB) pada tahun 2000 untuk mengawasi dan menjaga agar proses konservasi di wilayah Bunaken berjalan dengan baik. Namun, DPTNB justru sering bermasalah dengan masyarakat lokal. Petugas DPNTTB lebih berperan sebagai polisi penjaga lingkungan daripada melibatkan masyarakat dalam menjalankan program pelestarian lingkungan di Bunaken. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan berbagai retribusi dan pungutan bagi pengusaha di kawasan Bunaken juga menjadi pemicu permasalahan ini.
- 3) Masalah lingkungan, menyangkut *miss management* infrastruktur, sampah, ancaman erosi, abrasi dan tambang perahu. Fasilitas publik dan infrastruktur yang dibangun pemerintah, seperti fasilitas air bersih, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangunan jalan tidak dibangun secara besar-besaran. Hal ini dilakukan karena kebijakan pemerintah sebelumnya tidak mengembangkan Bunaken sebagai kawasan pemukiman. Pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut tidak diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang baik dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

2. Kawasan Reklamasi

Reklamasi dalam terminologi asalnya disebut dengan *land reclamation* atau reklamasi lahan. Reklamasi merupakan proses menciptakan lahan atau areal baru di laut, sungai ataupun danau. Dalam perencanaan reklamasi harus melibatkan banyak bidang secara multidisipliner karena pelaksanaan reklamasi sering diikuti berbagai permasalahan di daratan maupun di laut yang saling berkaitan.



Gambar 4.4 Peta Kawasan Reklamasi di Pesisir Teluk Manado

Sumber: Materi Teknis Reklamasi Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam keadaan ideal, sebuah kota yang berpotensi mengalami perluasan lahan dengan reklamasi harus mempunyai cetak biru *master plan* yang berwawasan jauh ke depan. Penyusunannya harus memperhitungkan faktor pengaruh reklamasi terhadap bagian hulu sampai ke hilir wilayah sungai-sungai yang bermuara ke daerah reklamasi. Pada kenyataannya, hampir semua daerah reklamasi di Indonesia sangat rentan terhadap kejadian banjir dan genangan di musim penghujan. Hal ini terjadi karena waktu dan panjang perjalanan aliran semakin lama dan jauh menuju pelepasan akhir di laut, serta sistem drainase dan penanggulangan banjir tidak terencana dengan baik.

Awalnya, reklamasi pantai di pesisir Teluk Manado merupakan program yang masih dapat diterima oleh sebagian masyarakat karena dampaknya belum terlalu dirasakan secara signifikan. Penambahan areal pantai dianggap tidak membawa dampak

yang besar bagi masyarakat yang bermukim di pesisir pantai ataupun disekitaran Kota Manado. Namun, kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh pengelola bisnis untuk kepentingannya sendiri. Sekitar 76 hektar wilayah pesisir pantai *boulevard* ditimbun untuk dijadikan pusat pertokoan dan perbelanjaan.

- a. Awal mula pengembangan pariwisata pada kawasan reklamasi.

Menurut sejarahnya, reklamasi pantai di Teluk Manado, sudah berjalan sejak tahun 1996 dan hingga akhir-akhir ini pekerjaan reklamasi di Teluk Manado masih berlangsung. Jika dilihat dari sudut pandang geomorfologi dan *hidro oseanografi* pantai, reklamasi yang selama ini dilakukan telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan pantai maupun perairan di Teluk Manado.

Munculnya ide reklamasi terhadap pantai di Kota Manado merupakan ide Gubernur E.E. Mangindaan dengan beberapa pengusaha yang ada di Kota Manado pada tahun 1995. Reklamasi yang ditujukan adalah reklamasi di daerah pantai yang letaknya di utara Kota Manado. Reklamasi dilakukan untuk mengembangkan kawasan bisnis di Manado yang telah berkembang dengan mengoptimalkan daerah pantai (Manado Post, 2010). Pada tanggal 20 Juli 1995, reklamasi daerah pantai Kota Manado direalisasikan dengan dibuatnya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Manado dengan PT. Megasurya Nusa Lestari, selaku pihak pemohon reklamasi pantai Manado.

Konsep rencana penggunaan ruang Kota Manado adalah *mixed use* atau campuran. Selanjutnya, berikut rencana pengembangan di kawasan reklamasi yang terdistribusi dalam 3 kecamatan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2000-2010.

- 1) Kecamatan Wenang, direncanakan sebagai kawasan perdagangan, usaha, dan jasa; kawasan perkantoran dan pemerintahan; kawasan pelabuhan laut dan wisata; serta kawasan permukiman dan instalasi militer.

- 2) Kecamatan Sario, direncanakan sebagai kawasan permukiman; kawasan jasa (reklamasi); kawasan perkantoran dan pemerintahan; kawasan perdagangan, usaha, dan kawasan instalasi militer.
- 3) Kecamatan Malalayang, direncanakan sebagai kawasan wisata pantai.



Gambar 4.5 Kondisi Eksisting Kawasan Reklamasi Pesisir Teluk Manado

Sumber: Materi Teknis Reklamasi Kementerian Pekerjaan Umum

b. Permasalahan pariwisata di kawasan reklamasi.

Secara sederhana, sistem reklamasi pantai akan menimbun lahan di dekat pantai, maka ekosistem yang berada di lahan timbunan akan musnah. Sebagai contohnya, di sepanjang pantai Manado sampai ke daerah Malalayang sudah tidak ditemukan lagi tanaman bakau, hanya ada rumput dan bebatuan.

Dampak lain dari reklamasi ialah kerusakan potensi sumber daya laut. Ekosistem perairan pantai sangat rentan terhadap perubahan sehingga apabila terjadi perubahan secara alami maupun rekayasa, maka mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Misalnya, adanya perubahan gelombang laut di sekitar pantai Manado membuat tanah

timbunan di sekitar kawasan reklamasi terkikis. Oleh karena itu, harus dibangun dinding pembatas untuk menahan gelombang laut agar tidak merusak kawasan reklamasi. Semakin kuat gelombang yang bertabrakan dengan dinding, maka akan mengurangi kadar oksigen di tempat tersebut dan terjadilah eutrofikasi. Jika oksigen dalam air terus berkurang, maka makhluk hidup di kawasan tersebut akan musnah.

3. Kawasan Malalayang

Pantai Malalayang yang terletak di ujung selatan Kota Manado memiliki taman laut yang alami dengan berbagai jenis koral warna-warni dan berbagai spesies ikan. Akses menuju pantai ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari pusat Kota Manado dengan menggunakan angkutan umum. Pantai ini menjadi satu-satunya tempat wisata rakyat yang murah karena aksesnya dekat dan mudah ditempuh. Banyak wisatawan yang memilih tempat ini menjadi tujuan wisata bersama keluarga di akhir pekan karena biaya murah dan pemandangan bawah laut yang indah.

Kondisi struktur pantai dipenuhi dengan batu-batu hitam, seperti batu kali (sungai) keras yang terdapat disepanjang pantai. Kondisi ombaknya relatif tenang sehingga cocok untuk bersantai. Dasar tepian pantai ini melandai dengan kedalaman ± 2 meter pada jarak antara 15-20 meter. Kondisi bibir pantai berbatu dan di bagian dasar pantai didominasi pasir hitam.

50 cm dengan posisi tangan memberkati yang sengaja diletakkan di bawah laut Pantai Malalayang.

- b. Permasalahan pariwisata di kawasan Malalayang.
 - 1) Masalah ekonomi, berupa perbedaan penghasilan antarmasyarakat dalam melakukan usaha. Hal ini berdampak terhadap perbedaan perlakuan mereka terhadap keberlanjutan pengembangan kawasan. Rata-rata, masyarakat yang secara ekonomi berusaha dengan modal secukupnya cenderung tidak peduli dengan kebersihan kawasan. Padahal, kebersihan kawasan akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan kawasan Malalayang.
 - 2) Masalah sosial, berupa peralihan pengelola kawasan Pantai Malalayang yang awalnya dikelola oleh pihak Kecamatan Malalayang, Kemudian dialihkan ke Dinas Pariwisata Kebudayaan.
 - 3) Masalah lingkungan, berupa permasalahan pengelolaan sampah. Sampah didominasi botol plastik, bungkus makanan, serta potongan kayu dan bambu.

Kelemahan Pengembangan Pariwisata Pesisir Pantai Teluk Manado

1. Aturan hukum belum jelas

Salah satu kelemahan kebijakan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado ialah kekurangan payung hukum karena belum ada peraturan daerah tentang kebijakan pariwisata. Sejauh ini, dasar kebijakan pengembangan pariwisata mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata; serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yakni sebagai institusi yang menangani urusan kebudayaan dan pariwisata.

2. Tata ruang belum jelas

Salah satu hambatan yang sangat mendasar ialah belum adanya peraturan daerah Pariwisata karena belum disahkannya peraturan daerah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Tanpa RTRW, pemerintah tidak memiliki dasar untuk melakukan penataan ruang wilayah. Selain itu, dari sisi koordinasi juga terjadi tumpang tindih antarsektor.

3. Kerja sama antarwilayah belum maksimal

Kerja sama pengembangan pariwisata antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan. Provinsi Sulawesi Utara berupaya menjadi pintu gerbang Asia Pasifik, maka perlu ditunjang oleh kebijakan pariwisata dari pemerintah kabupaten/kota.

4. Kendala sinkronisasi antara kebijakan dan implementasi

Faktor budaya masyarakat yang hanya menunggu *suntikan dana* dari pemerintah menjadi masalah tersendiri. Perilaku seperti ini perlu diubah menjadi masyarakat yang proaktif, cerdas, dan kreatif dalam mengembangkan daerahnya dan memajukan pariwisatanya. Tanggung jawab pemerintah daerah ialah merancang program pembangunan dengan dukungan penuh masyarakat sebagai *stakeholder*.

5. Kebijakan infrastruktur belum terintegrasi

Pengembangan kepariwisataan kawasan pesisir Teluk Manado tidak mungkin berhasil tanpa dukungan pembangunan infrastruktur wisata secara terintegrasi. Masih banyak infrastruktur pariwisata yang perlu dibangun, seperti jalan, tanda pariwisata, dermaga, dan infrastruktur lainnya. Salah satu keluhan dari wisatawan seperti kondisi jalan rusak dan sarana transportasi belum memenuhi standar. Selain itu, ketersediaan air bersih di lokasi objek wisata juga menjadi masalah.

6. Kebijakan perizinan belum tuntas

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) menjadi rekomendasi penting bagi pemerintah sebagai pengambil

kebijakan dalam pemberian izin pariwisata. Selain itu, pemberian izin bangunan dan izin tempat usaha juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

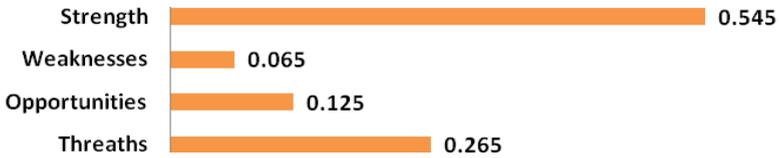
7. Lemahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat

Pengembangan kawasan pesisir Teluk Manado lebih mengandalkan pesona masyarakat terhadap keindahan alam dan laut. Konsep *sustainable tourism* yang dikembangkan belum diarahkan agar menyentuh komunitas masyarakat. Padahal, harapannya komunitas lokal/masyarakat akan berpartisipasi dalam kepariwisataan saat ini hingga masa yang akan datang. Salah satu kelemahan kebijakan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado adalah lemahnya peran partisipasi masyarakat.

Pengembangan strategi promosi dan pemasaran berbasis masyarakat harus terus dilakukan. Misalnya, pencitraan budaya melalui peran masyarakat melalui legenda, cerita rakyat, hikayat kuno, dan sebagainya untuk dipresentasikan/disampaikan secara lisan dan tertulis saat promosi destinasi. Selama ini, penyampaian hanya disampaikan langsung dari pemandu wisata. Proses penyampaian tersebut masih kurang karena belum menyajikan cerita atau legenda di kawasan objek wisata sebagai bahan informasi yang dapat dibaca oleh wisatawan.

Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Pantai Teluk Manado

Evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisis ini menguantifikasi hasil temuan potensi dan kelemahan yang di tiga kawasan pengembangan pesisir Teluk Manado, yaitu kawasan Bunaken, Reklamasi, dan Malalayang.



Gambar 4.7 Analisis SWOT di Kawasan Pesisir Teluk Manado

1. Komponen *Strength* (Kekuatan)

Dalam pengembangan pariwisata di pesisir Teluk Manado, daya dukung pariwisata merupakan faktor yang sangat kuat dan sangat berpengaruh terhadap faktor pembentuk kekuatan (*strength*). Dengan adanya dukungan kawasan, diharapkan kinerja pengembangannya dapat dimaksimalkan melalui berbagai strategi di masa mendatang.

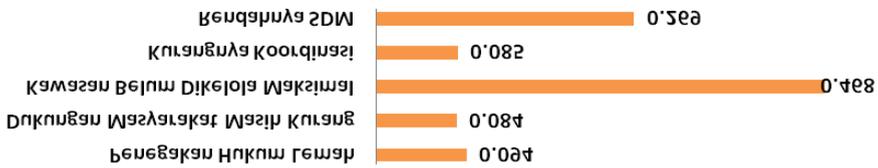


Gambar 4.8 Hasil Analisis Komponen *Strength* (Kekuatan)

Selanjutnya, potensi SDA (Sumber Daya Alam) menjadi prioritas kedua dalam komponen *strength* pengembangan pariwisata di pesisir Teluk Manado. Dengan adanya dukungan kebijakan pariwisata dari pemerintah maupun dari penyelenggara wisata, serta didukung oleh aksesibilitas yang mudah merupakan faktor kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata.

2. Komponen *Weaknesses* (Kelemahan)

Faktor yang memengaruhi komponen *weaknesses* ialah kurangnya koordinasi dan keterpaduan antarsektor dalam pengembangan dan keberlanjutan wisata bahari; kawasan pariwisata belum dikelola secara optimal; kurang mendapat dukungan dari masyarakat setempat; lemahnya penegakan hukum lingkungan; dan rendahnya SDM.



Gambar 4.9 Hasil Analisis Komponen *Weaknesses* (Kelemahan)

Faktor kawasan pariwisata yang belum dikelola secara optimal merupakan faktor kelemahan yang menjadi prioritas pertama dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado. Hal ini dapat dilihat dari perluasan kawasan wisata dengan cara mereklamasi kawasan pesisir menjadi kawasan wisata dan mengorbankan kawasan pantai yang terdapat di kawasan tersebut. Selain itu, objek wisata ini dieksploitasi sangat eksekif untuk menghasilkan devisa dan mengabaikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, banyak terjadi kerusakan biota laut akibat pencemara.

3. Komponen *Opportunities* (Peluang)

Faktor target Pemerintah Kota Manado merupakan faktor utama yang menjadi peluang dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Kota Manado. Faktor penting lainnya berturut-turut yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli daerah (PAD), serta tingginya dukungan dari LSM setempat dan donator internasional untuk mengembangkan kawasan pariwisata.



Gambar 4.10 Hasil Analisis Komponen *Opportunities* (Peluang)

Pemerintah sebagai pengambil keputusan memegang peranan yang sangat besar dalam pengembangan destinasi pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado. Kondisi ekologi yang bagus sangat mendukung kegiatan pengembangan pariwisata. Namun, jika tidak ada dukungan dari pihak pemerintah, maka

pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado sebagai destinasi pariwisata unggulan tidak akan optimal dan tidak berkelanjutan.

4. Komponen *Threats* (Ancaman)

Komponen yang menjadi ancaman dalam pengembangan dan keberlanjutan pariwisata di kawasan pesisir Kota Manado yaitu degradasi sumber daya akibat aktivitas wisata yang tidak dikelola dengan baik; meningkatnya pencemaran lingkungan dari darat dan laut; serta spesies yang dilindungi mempunyai nilai ekonomis tinggi.



Gambar 4.11 Hasil Analisis Komponen *Threats* (Ancaman)

Komponen utama yang menjadi ancaman dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado ialah meningkatnya pencemaran lingkungan di darat dan laut. Meningkatnya intensitas pencemaran lingkungan perairan merupakan akibat aktivitas di daratan dan lautan, seperti limbah detergen rumah tangga dan industry. Kondisi seperti ini akhirnya menyebabkan daya tarik objek wisata menjadi berkurang sehingga akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan masyarakat. Tingginya tingkat pencemaran tersebut merupakan faktor ancaman yang sangat penting diperhatikan dalam upaya pengembangan wisata bahari. Oleh karena itu, kebijakan terhadap faktor ancaman harus ditangani melalui perumusan strategi berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS PARTISIPASI

Pengertian Pendekatan Partisipasi

1. Pengertian partisipasi

Menurut Okazaki (2008), partisipasi merupakan sebuah proses yang melibatkan pejabat pemerintah daerah, warga lokal, pengusaha, dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif dianjurkan sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pertimbangan tersebut dilakukan karena pendekatan ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengurangan dampak negatif pariwisata, sekaligus meningkatkan dampak positif pariwisata.

Menurut Slamet (1993), faktor-faktor internal yang memengaruhi partisipasi masyarakat ialah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Sementara itu, faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai pemangku kebijakan (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program (Sunarti, 2003:79). Dalam hal ini, faktor-faktor eksternal dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado meliputi pemerintah, konsultan perencanaan, dan swasta (pengembang/LSM).

Coyners (1991) menyampaikan, sda tiga alasan utama terkait pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, yaitu

- a. sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, sikap, dan kondisi masyarakat setempat;
- b. sebagai langkah awal mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi, serta cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat lokal terhadap program pembangunan yang dilaksanakan; dan
- c. masyarakat mempunyai hak untuk turut serta dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka.

Tingkat partisipasi dalam suatu program/kegiatan akan terbentuk jika pihak yang terlibat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang program/kegiatan yang akan diikutinya. Setelah memiliki pemahaman yang baik, maka selanjutnya diperlukan sikap yang mendukung program/kegiatan yang diselenggarakan, kemudian diterapkan dalam bentuk partisipasi.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh setiap individu berpengaruh terhadap sikap/perilaku individu. Menurut Harja (2001), faktor pemahaman responden terhadap hutan mangrove cukup berperan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove. Izaryadi (2001) menambahkan, pemahaman nelayan terhadap ekosistem terumbu karang berpengaruh besar terhadap partisipasi pelestarian ekosistem terumbu karang.

2. Sikap dan pemahaman partisipasi

Menurut Rakhmat (2005), sikap memiliki beberapa pengertian. *Pertama*, sikap adalah kecenderungan bertindak, berekspresi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. *Kedua*, sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. *Ketiga*, sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. *Keempat*, sikap timbul dari pengalaman dan tidak dibawa

sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Oleh karena itu, sikap dapat dipertahankan atau diubah.

Thompson & Barton (dalam Widiyanta, 2005) menyatakan, ada tiga sikap yang mendasari dukungan individu terhadap permasalahan lingkungan.

a. Ekosentrik

Individu yang bersikap ekosentrik memandang bahwa perlindungan terhadap lingkungan alam dilakukan untuk kepentingan lingkungan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa lingkungan alam memang patut mendapat perlindungan karena nilai-nilai intrinsik yang dikandungnya. Individu yang memiliki sikap ekosentrik cenderung lebih banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dan lebih banyak terlibat dalam kegiatan konservasi lingkungan.

b. Antroposentrik

Antroposentrik merupakan kecenderungan untuk memandang alam sebagai suatu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Konsep ini menggunakan kesejahteraan manusia sebagai alasan utama dari setiap tindakannya. Individu dengan kecenderungan antroposentrik berpendapat bahwa lingkungan perlu dilindungi karena nilai yang terkandung di dalam lingkungan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Individu dengan sikap antroposentrik cenderung memiliki perhatian yang kurang terhadap permasalahan lingkungan alam dan jarang melakukan kegiatan konservasi atau perlindungan lingkungan alam.

c. Apatis

Apatis merupakan sikap tidak peduli terhadap permasalahan lingkungan. Orang yang memiliki sikap apatis terhadap lingkungan alam memiliki kecenderungan tidak mengadakan konservasi terhadap lingkungan alam.

3. Tingkat partisipasi

Sherry Arnstein (1969) mengatakan, terdapat tingkat-tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh pembangunan.

- a. Tidak ada partisipasi (*non participation*)
 - 1) Manipulasi (*manipulation*), tingkat partisipasi yang paling rendah dengan memosisikan masyarakat sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat.
 - 2) Terapi/penyembuhan (*therapy*), masyarakat terlibat dalam kegiatan, tetapi hanya menerima masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.
- b. Penghargaan (*tokenism*)
 - 1) Informasi (*informing*), masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memengaruhi rencana dan disampaikan pada akhir perencanaan.
 - 2) Konsultasi (*consultation*), masyarakat diberikan kesempatan melakukan dua arah, tetapi tidak ada jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.
 - 3) Penenteraman/perujukan (*placation*), tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan.
- c. Kontrol masyarakat (*citizen power*)
 - 1) Kerja sama (*Partnership*), pada tingkat ini telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.
 - 2) Pelimpahan kekuasaan (*delegated power*), pada tingkat ini masyarakat diberikan untuk memberikan keputusan dominan saat merencanakan program tertentu. Jadi, masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana, kemudian ditetapkan oleh pemerintah.
 - 3) Kontrol masyarakat (*citizen control*), pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program

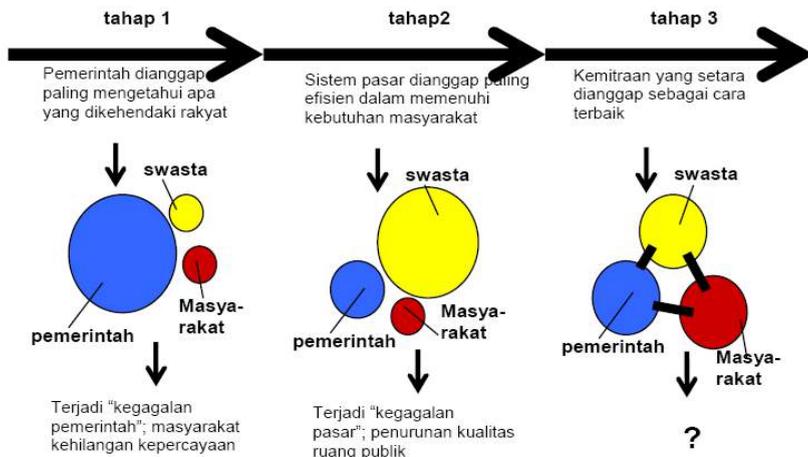
atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Jadi, masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program yang dibuatnya.

Pendekatan Partisipasi Berbasis Masyarakat

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung terhadap pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Masyarakat ini merupakan masyarakat nelayan yang terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudi daya ikan, pedagang ikan, dan pengolah ikan. Menurut Nikijuluw (2002), dalam bidang nonperikanan, masyarakat pesisir terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumber daya nonhayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya.

Secara operasional, masyarakat pesisir merupakan kelompok yang dominan bermukim di kawasan pesisir di seluruh Indonesia. Sebagian masyarakat nelayan pesisir merupakan pengusaha skala kecil dan menengah. Usaha dan kegiatan ekonominya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek karena skala usahanya sangat kecil.

Paradigma pembangunan yang berbasis partisipasi relevan dengan kebijakan desentralisasi. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Mengembangkan partisipasi masyarakat sebagai strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) akan mampu menjawab permasalahan sosial dalam masyarakat.



Gambar 5.1 Tahapan Ideal Partisipasi

Sumber: Escapp (1999)

Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan pengembangan kapasitas masyarakat sekitar. Menurut Cupples (2005), pengembangan kapasitas komunitas di bidang pariwisata merupakan upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan komunitas di sekitar objek wisata agar berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata.

Peningkatan kapasitas lokal masyarakat tidak hanya menguntungkan penduduk setempat, tetapi juga menguntungkan perusahaan yang beroperasi di daerah objek wisata. Perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja terampil yang mempunyai komitmen jangka panjang karena mereka tinggal di tempat tersebut dan peluang untuk pindah ke tempat lain hampir rendah. Dengan demikian, partisipasi perusahaan dalam peningkatan kapasitas masyarakat lokal menguntungkan perusahaan dan komunitas tempat mereka berusaha.

Pemberdayaan masyarakat semacam ini biasanya juga dilakukan pemerintah dan organisasi nonpemerintah (NGO). Menurut Ashley (2001), salah satu tugas pemerintah ialah menghapus kemiskinan melalui kebijakan pariwisata. Selain pemerintah, NGO juga sering melakukan pelatihan dalam rangka pemberdayaan. Berbagai pelatihan tersebut biasanya dibiayai lembaga internasional, pemerintah dan NGO menjadi penyelenggara.

Hunt (2005) dalam studinya menemukan, kurangnya minat komunitas/masyarakat terhadap pengembangan pariwisata karena pariwisata merupakan sesuatu yang baru dan belum masuk dalam wacana mereka. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan peran partisipasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, kendalanya ialah dana yang tersedia terbatas sehingga tidak mungkin untuk merancang program pemberdayaan jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan pembangunan berbasis partisipasi merupakan solusi alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, peningkatan itu harus dicapai dengan cara yang sesuai dengan asas partisipasi dan keadilan, serta hasilnya dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia dan lingkungan.

Berkaitan dengan perlunya adaptasi partisipasi masyarakat dalam menyikapi perubahan lingkungan, maka upaya membangun kepedulian masyarakat perlu ditingkatkan. Adaptasi perubahan lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan teknologi melalui sosialisasi, diseminasi, dan koordinasi. Kepedulian masyarakat terhadap adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan (1) melakukan advokasi dan sosialisasi; (2) membangun sistem informasi iklim dan teknologi; dan (3) membangun dan memperkuat kelembagaan.

Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Partisipasi

Model merupakan suatu abstraksi dari sebuah realitas yang mampu menemukan berbagai variabel penting dan tepat dari realitas tersebut. Menurut Purnomo (2005), tidak ada model yang benar dan salah. Model dinilai dari tingkat berguna atau tidaknya model tersebut. Menurut fungsinya, model dapat diklasifikasi sebagai berikut.

1. Model deskriptif, yakni model yang melukiskan dan menggambarkan situasi tertentu seperti skema organisasi.
2. Model prediktif, yakni model yang melakukan peramalan dengan didasarkan model deskriptif. Namun, ada kemungkinan pernyataan dalam bentuk *apabila timbul keadaan A, maka keadaan B juga akan timbul*.

3. Model normatif, yakni model yang berdasarkan situasi yang diramalkan, dianjurkan, dan dilakukan tindakan-tindakan tertentu.

Pengembangan pariwisata di kawasan pesisir tentunya perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, termasuk masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan akan membawa dampak penting, yaitu terhindar dari terjadinya manipulasi, serta memperjelas kehendak masyarakat; memberi nilai tambah legitimasi rumusan perencanaan; serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Pemahaman mengenai bentuk dan tingkatan partisipasi masyarakat dapat menjadi dasar dikembangkannya model partisipasi dalam pengembangan pariwisata.

Sejak tahun 1980-an, peneliti kepariwisataan sudah mulai mengembangkan beberapa pendekatan dalam rangka pengembangan pariwisata. Paling tidak terdapat dua model pendekatan teoritis yang berkembang, yaitu model daur hidup (*life cycle model*) oleh Butler (1980) dan model ketergantungan (*dependency perspective*) oleh Britton (1982). Model *Tourism Area Life Cycle* yang dikembangkan Butler menunjukkan pola perkembangan daerah tujuan wisata yang secara umum terjadi di dunia. Dalam konsep teori tersebut, dikatakan ada 6 tahap perkembangan daerah tujuan wisata.

1. Pertama, tahap explorasi (*exploration stage*). Tahap ini menggambarkan wilayah yang masih sangat murni dengan jumlah wisatawan sedikit. Wisatawan mengatur sendiri segala keperluan perjalanannya dan hadir karena tertarik dengan keunikan budaya/alamnya. Fasilitas khusus untuk wisatawan belum tersedia. Wisatawan bergaul dan terlibat secara intensif dengan masyarakat lokal. Kunjungan wisatawan belum memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat lokal, baik secara ekonomi maupun sosial.
2. Kedua, tahap keterlibatan (*involvement stage*). Jumlah wisatawan meningkat dan mulai terpola, sejumlah penduduk lokal mulai menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan. Kontak antara pengunjung dan penduduk lokal tetap tinggi, terlebih bagi mereka yang menyediakan kebutuhan wisatawan.

- Mulai ada musim turis dan penyesuaian-penyesuaian pola sosial, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Mulai ada juga kegiatan dalam pengaturan perjalanan wisatawan. Akhirnya, mulai terjadi tekanan-tekanan kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur dan transportasi bagi wisatawan.
3. Ketiga, tahap pengembangan (*development stage*). Wilayah pasar wisatawan sudah tetap karena adanya promosi besar-besaran di wilayah-wilayah dasar potensial. Pada tahap ini, keterlibatan dan kontrol terhadap pengembangan masyarakat menurun dengan cepat. Fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal akan hilang dan digantikan oleh fasilitas-fasilitas yang lebih besar, lebih komplet, dan maju yang diselenggarakan oleh investor luar, terutama untuk akomodasi. Atraksi-atraksi alam dan budaya akan dikembangkan dan dipasarkan secara khusus, ditambah dengan atraksi-atraksi dari luar. Perubahan fisik akan tampak, tetapi tidak semuanya diterima hasilnya oleh masyarakat lokal. Keterlibatan pemerintah lokal dan nasional dalam perencanaan dan penyediaan fasilitas menjadi penting meskipun tidak selalu sesuai dengan minat masyarakat lokal. Selain itu, tenaga kerja dari luar dan fasilitas bagi industri wisata mulai diperlukan di objek wisata.
 4. Keempat, tahap konsolidasi. Tingkat rata-rata pertumbuhan wisatawan menurun, tetapi total jumlah wisatawan tetap meningkat. Jumlah total wisatawan lebih dari jumlah penduduk setempat. Ekonomi lokal secara umum masih tergantung dari pariwisata. Pemasaran dan promosi meluas, serta ada upaya untuk memperpanjang musim turis dan wilayah pasar. Banyak usaha *franchise* dan *chains* yang berkembang. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang dan fasilitas wisatawan menimbulkan perlawanan dan ketidakpuasan di antara penduduk, terutama mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan pariwisata karena aktivitas mereka menjadi terbatas atau terganggu.
 5. Kelima, tahap stagnan. Ketika jumlah wisatawan sudah mencapai puncak. Level kapasitas untuk variabel lain telah tercapai atau melewati batas sehingga mulai timbul masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Wilayah sudah mempunyai promosi yang mapan, tetapi menjadi tidak lagi populer. Mulai timbul ketergantungan

terhadap kunjungan berulang dan konvensi-konvensi atau kegiatan sejenis di daerah tujuan wisata. Daya tarik alam dan budaya yang alami sudah mulai digantikan dengan fasilitas artifisial. *Image resort* sudah terlepas dari konteks lingkungan geografis. Properti yang ada cenderung berpindah tangan dengan cepat dan konsep *mass tourism* menjadi dominan.

6. Keenam, tahap penurunan. Wilayah mulai tidak mampu lagi berkompetisi dengan daerah tujuan wisata baru dan mulai kehilangan pasar. Tidak lagi menarik bagi mereka yang ingin berlibur, lebih banyak digunakan untuk menghabiskan *weekend* atau kunjungan singkat. Fungsi sebagai daerah tujuan wisata hilang sama sekali. Sebelum mengalami penurunan, maka tahap *rejuvenation* dapat dilakukan. Namun, agar proses *rejuvenation* terjadi, maka diperlukan perubahan total pada daya tarik. Evolusi terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk perubahan selera dan kebutuhan wisatawan; merosotnya kualitas fisik dan fasilitas di daerah tujuan wisata; perubahan atau hilangnya daya tarik alam dan budaya yang pada mulanya menjadikan daerah tujuan wisata tersebut populer di kalangan para wisatawan.

Dalam model pengembangan terdapat beberapa dimensi yang harus diperhatikan.

1. Dimensi keberlanjutan dalam model pengembangan
 - a. Dimensi ekologis

Suatu kegiatan pembangunan dinyatakan berkelanjutan apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis, dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti bahwa kegiatan tersebut dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam) agar dapat berkelanjutan.

Dalam skala tertentu, setiap pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pesisir dan laut dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada ekosistem yang akan memberikan pengaruh pada mutu lingkungan hidup. Semakin tinggi laju pembangunan di kawasan pesisir dan laut,

maka semakin tinggi pula juga pemanfaatan sumber daya alamnya. Pemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu lingkungan hidup dan berlanjut dengan terjadinya kerusakan.

b. Dimensi ekonomi

Memahami dimensi ekonomi dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata di kawasan pesisir sangat penting. Sebagai kegiatan yang berbasis sumberdaya alam (*natural resourcebased activity*), terumbu karang merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis pasar (*market-based activity*). Oleh karena itu, perumusan suatu tatanan pengelolaan terumbu karang patut pula memperhatikan dimensi ekonomi yang berkaitan (Adrianto, 2006).

Elemen utama dimensi ekonomi meliputi aspek permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) komoditas yang dihasilkan dari sumber daya yang dikelola. Dimensi sosial ekonomi juga menggambarkan kejadian-kejadian yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran, serta hubungan antara pelaku ekonomi (Fauzi dan Anna, 2005). Berkelanjutan secara ekonomis berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital (*capital maintenance*), dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien.

c. Dimensi sosial

Menurut Cicin-Sain *et al.* (2003), berkelanjutan secara sosial artinya kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Pollinac *et al.* (2003) menambahkan, semua pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan berkelanjutan secara bersama-sama sangat penting sebagai faktor utama penentu keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir.

Peran serta tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa hal. Para pemangku kepentingan bersedia untuk berperan serta karena mereka melihat manfaat yang diharapkan akan diperolehnya (*perceived benefits*), kemungkinan pemerataan manfaat di antarapemangku kepentingan, dan keberlanjutan manfaat setelah proyek selesai. Oleh karena, pemangku kepentingan berperan serta dalam perencanaan proyek dan merasa memainkan peran dalam menyusun lahirnya proyek.

Christie *et al* (2003) mengatakan, dukungan seluruh pemangku kepentingan kawasan pesisir merupakan faktor penting terhadap keberlanjutan program. Konflik kepentingan akan menciptakan ketidakpuasan di antara mereka apabila tidak diambil langkah-langkah proaktif. Ketidakpuasan tersebut jika tidak diselesaikan dengan cara yang bijak, dapat mengakibatkan terancamnya keberlanjutan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir karena mereka akan melanggar kesepakatan atau peraturan yang disepakati.

Menurut Sievanen (2003), wisata bahari sebagai mekanisme pengenalan modal internasional dan kekuasaan negara justru sering berakibat buruk, yaitu marginalisasi pengguna sumber daya pesisir. Oleh karena itu, diperlukan dua hal dalam mengatasi hal tersebut. *Pertama*, perlunya mendefinisikan secara lebih tegas komunitas yang hendak dijadikan sasaran untuk diberdayakan oleh suatu program pengelolaan sumber daya pesisir karena sering dijumpai ketidakjelasan mengenai pihak yang akan diuntungkan oleh suatu program pengelolaan sumber daya pesisir. *Kedua*, kemitraan antara sektor publik dan sektor dunia usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan lingkungan hidup hendaknya mencakup komunitas yang hidupnya tergantung pada sumber daya pesisir dan lautan (*coastal and marine-dependent communities*).

2. Kesesuaian dan daya dukung lingkungan

Kesesuaian lahan (*land suitability*) merupakan kecocokan (*adaptability*) suatu lahan untuk tujuan penggunaan tertentu.

Penentuan nilai lahan serta pola tata guna lahan dihubungkan dengan potensi wilayahnya sehingga dapat diusahakan penggunaan lahan yang lebih terarah beserta usaha pemeliharaan kelestariannya. Pengembangan daerah yang optimal dan berkelanjutan membutuhkan suatu pengelolaan keruangan wilayah pesisir yang matang. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian tentang model pengelolaan dan arahan pemanfaatan wilayah pesisir yang berbasis digital dengan menggunakan SIG merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu dikaji (Harjadi, 2004).

Pengembangan berkelanjutan (*sustainable development*) suatu wilayah pesisir dan laut memerlukan empat persyaratan. *Pertama*, setiap kegiatan pembangunan, seperti pemukiman dan pariwisata harus ditempatkan di lokasi yang secara biofisik sesuai. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan cara membuat peta kesesuaian lahan. *Kedua*, jika memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui, seperti penangkapan ikan di laut, maka tingkat penangkapannya tidak boleh melebihi potensi lestari stok ikan tersebut. *Ketiga*, jika membuang limbah ke lingkungan perairan, maka jumlah limbah tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan perairan tersebut. *Keempat*, jika memodifikasi bentang alam suatu wilayah, maka harus sesuai dengan pola hidrodinamika setempat dan proses-proses alami lainnya.

Selanjutnya, Gunn (1993) mengemukakan bahwa pembangunan suatu kawasan wisata berkelanjutan apabila secara optimal didasarkan pada empat aspek berikut.

- a. Mempertahankan kelestarian lingkungannya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
- c. Menjamin kepuasan pengunjung.
- d. Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangannya.

Kondisi lingkungan kawasan pariwisata merupakan unsur penting yang perlu diketahui dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir agar berlangsung optimal dan berkelanjutan. Kesesuaian spasial untuk pariwisata pesisir berhubungan

dengan cara menata suatu kawasan pesisir agar pemanfaatannya berdasarkan kesesuaian (*sustainability*) lahan.

PENERAPAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS PARTISIPASI DI PESISIR PANTAI TELUK MANADO

Pariwisata Pesisir merupakan salah satu pilar keberlanjutan pariwisata yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan. Pariwisata harus direncanakan sesuai dengan kriteria: standar pembangunan berkelanjutan. pencapaian dari ditentukan kriteria pengembangan ekowisata berkelanjutan dengan peran partisipasi masyarakat (Warouw et al., 2019).

Pemahaman *Stakeholder* terhadap Prinsip Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Pantai Teluk Manado

Setelah dilakukan identifikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado, kegiatan selanjutnya ialah melakukan analisis tentang pemahaman pengembangan pariwisata yang disetujui oleh para pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata tersebut. Dalam hal ini, *stakeholder* yang dimaksudkan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pemerintah, kelompok swasta, dan kelompok masyarakat.

Untuk mengetahui pendapat masyarakat di kota Manado terhadap pariwisata, dikemukakan pertanyaan menyangkut pemahaman tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan. Responden pada umumnya mengetahui pariwisata yang dikembangkan, tetapi mereka beranggapan pariwisata berkelanjutan hanya terbatas pada

wisata alam. Sebanyak 71% *mengetahui* maksud visi pengembangan pariwisata, sedangkan 29% *tidak mengetahui* pengertian pariwisata berkelanjutan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di Kota Manado memahami visi pengembangan pariwisata di kota Manado, khususnya pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado yang merupakan pusat pengembangan utama.

Pengetahuan masyarakat mengenai pengembangan pariwisata di kawasan pesisir merupakan tindak lanjut perumusan visi Manado sebagai kota model ekowisata. Selanjutnya, dijabarkan berbagai pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan. Jawaban masyarakat tersebut dikompilasi dengan wawancara dari berbagai *stakeholder* agar dapat ditemukan faktor yang memengaruhi pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado, sekaligus fungsi dan implikasinya bagi keberlanjutan.

1. Pendapat terhadap pengembangan pariwisata di Pesisir Teluk Manado sebagai bagian dari pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan penelitian, sebanyak 69,35% masyarakat *setuju*, sebanyak 17,74% *sangat setuju*, 8,06% menyatakan *ragu-ragu*, serta 4,83% menyatakan *tidak setuju* dengan pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado sebagai bagian pengembangan visi Manado kota model ekowisata.

Berdasarkan data tersebut, dapat di justifikasi bahwa masyarakat Kota Manado pada umumnya menyetujui visi pengembangan ekowisata yang telah dicanangkan. Mereka menyadari bahwa dengan mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata tidak akan banyak merubah kebiasaannya. Namun, mereka akan menerima keuntungan lain dari hasil pariwisata yang selama ini belum mereka peroleh.

2. Pendapat terhadap pelestarian sosial, budaya, dan lingkungan lokal untuk menunjang pengembangan pariwisata. Berdasarkan penelitian, masyarakat memandang perlu dilestarikannya sosial budaya, seperti budaya gotong-royong atau *mapalus* dalam bentuk kerja sama masyarakat yang merupakan salah satu potensi pendukung dalam upaya mewujudkan pengembangan kota model ekowisata.

3. Pendapat tentang keberadaan potensi alam perlu dipertahankan untuk menunjang pengembangan pariwisata. Berdasarkan penelitian, sebagian besar masyarakat menyambut positif terhadap upaya pelestarian potensi alamnya untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sebanyak 54,84% menyatakan *setuju* dan 14,52% menyatakan *sangat setuju*.
4. Pendapat tentang keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Berdasarkan penelitian, masyarakat menunjukkan adanya keinginan untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan penerapan rencana pengembangan Manado Kota Model Ekowisata.
5. Pendapat terhadap aset masyarakat dijadikan penunjang dalam pengembangan pariwisata. Berdasarkan penelitian, sebanyak 17,74% menyatakan *sangat setuju* dan 19,35% menyatakan *setuju*. Namun, terdapat 46,77% sikap masyarakat yang *ragu-ragu* sehingga dapat disimpulkan masyarakat Kota Manado tidak keberatan aset mereka digunakan sebagai bagian dari pengembangan ekowisata. Adanya masyarakat yang tidak setuju karena mereka menganggap masih belum jelas tentang aset mereka yang akan digunakan dalam menunjang pengembangan ekowisata.
6. Pendapat terhadap pengembangan pariwisata akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat sangat setuju jika pengembangan ekowisata mempekerjakan masyarakat setempat sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Tokoh masyarakat setempat mengharapkan pengembangan ekowisata dapat dilakukan dengan mempekerjakan masyarakat setempat sehingga memberikan kesempatan kepada mereka yang belum mempunyai pekerjaan tetap.
7. Pendapat terhadap diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebagai persiapan tenaga kerja bidang pariwisata. Berdasarkan penelitian, dukungan dari masyarakat setempat terhadap diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebagai tenaga kerja bidang pariwisata dapat diketahui sebanyak 58,06% masyarakat setempat menyatakan *setuju*; 22,58% menyatakan *sangat setuju*; dan 12,90% menyatakan *ragu-ragu*. Maka, dapat disimpulkan ke dalam sikap yang sama, yaitu *setuju*.

8. Pendapat masyarakat tentang keterlibatan swasta dalam pengelolaan pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 37,10% masyarakat setempat berpendapat *masih ragu* apabila ekowisata dikelola oleh swasta; 33,87% menyatakan *setuju*; dan 11,29% menyatakan *sangat setuju*.
9. Pendapat terhadap upaya pengembangan pariwisata akan berdampak positif, seperti dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan penelitian, masyarakat setuju jika pengembangan ekowisata akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sebanyak 33,87% menyatakan *setuju* dan 17,74% menyatakan *sangat setuju*.
10. Pendapat terhadap perlunya retribusi dalam pengembangan kota pariwisata. Berdasarkan penelitian, masyarakat di Kota Manado setuju apabila retribusi dari hasil objek wisata dikembalikan lagi untuk membiayai pengembangan objek wisata di Kota Manado. Sebanyak 33,87% menyatakan *masih ragu-ragu* dan 19,35% menyatakan *setuju*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak keberatan apabila dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado, mereka akan dilibatkan. Namun, pelibatan masyarakat dilakukan dengan memberikan beberapa persyaratan, yaitu melibatkan masyarakat setempat, memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, pelestarian potensi alam yang tersedia, serta mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat.

Tingkat Partisipasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

1. Kawasan Bunaken

Tingkat partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori tingkat *consultation*. Pada tingkat *consultation* (konsultasi) dapat diartikan bahwa tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan karena adanya hal-hal berikut.

- a. Pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam penyusunan rencana umum

pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Bunaken.

- b. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif dengan dialog dua arah.
 - c. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.
 - d. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.
 - e. Pada tingkat *consultation* ini, suatu tingkat partisipasi masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.
2. Kawasan Reklamasi

Tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *informing*. Pada tingkat *informing* (informasi), dapat diartikan bahwa tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan karena hal-hal berikut.

- a. Pemberian informasi kepada masyarakat yang ikut dilibatkan dilakukan dengan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana umum pengembangan pariwisata di kawasan reklamasi.
 - b. Dalam hal ini, informasi diberikan lewat surat dan lewat forum pertemuan.
 - c. Pada tingkat *informing*, suatu tingkat partisipasi masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.
3. Kawasan Malalayang

Tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *partnership*. Pada tingkat *partnership* (kerjasama), dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan meliputi hal-hal berikut.

- a. Pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam penyusunan rencana umum pengembangan pariwisata di kawasan Pesisir Malalayang.
- b. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif melalui dialog dua arah.
- c. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.
- d. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.
- e. Pada tingkat *partnership*, tingkat partisipasi masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan

Salah satu keberhasilan pengembangan pariwisata ialah partisipasi dan dukungan masyarakat di kawasan pengembangan pariwisata tersebut. Pariwisata tanpa dukungan masyarakat sekitar biasanya tidak bertahan lama atau dengan kata lain tidak akan berkelanjutan. Dukungan masyarakat sangat tergantung pada partisipasi mereka dalam pariwisata. Partisipasi dapat teratasi jika pengembangan pariwisata memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Pengembangan Pariwisata di kawasan Bunaken, Reklamasi dan Malalayang mendorong munculnya peluang usaha baru bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, pengusaha dari luar memanfaatkan peluang usaha yang ada dengan mendirikan penginapan dan usaha penyelaman. Sementara itu, masyarakat lokal juga mengembangkan usaha lainnya di kawasan pariwisata.

Berdasarkan data penelitian, sebagian besar masyarakat berharap agar masukan/saran dari mereka lebih memberi pengaruh terhadap rencana pengembangan pariwisata. Masyarakat juga mengusulkan agar dialog pemerintah dan masyarakat lebih

diintensifkan lagi dengan menambah frekuensi pelibatan atau partisipasi masyarakat.

Usulan tingkat partisipasi lainnya yaitu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan keputusan, berbagi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan membuat keputusan terhadap rencana. Semua usulan masyarakat tersebut menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya lebih tinggi lagi, lebih dari sekedar tingkat *consultation* (*degree of tokenism*) saja. Untuk itu, di masa mendatang pemerintah berkewajiban memfasilitasinya agar dapat mencapai derajat kekuatan masyarakat (*degree of citizen power*).

Tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat keempat dari delapan tangga partisipasi Arnstein, yaitu berada pada tingkat *consultation* (konsultasi). Dari tahap sosialisasi perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan ditemukan perbedaan bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat. Tahapan partisipasi yang ditemukan kemudian disimpulkan sebagai tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata meliputi tahap informasi, tahap konsultasi, tahap kerja sama, dan tahap kontrol.

Metabolisme Pariwisata Berkelanjutan di kawasan Pesisir Pantai Teluk Manado

Metabolisme dalam bahasa Yunani *metabolismos* yang berarti perubahan adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organism termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatik, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Reaksi-reaksi tersebut adalah dasar dari kehidupan, yang membuat sel dapat tumbuh dan bereproduksi, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya.

Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi dari sel. Peran metabolisme inilah yang menjadikan suatu reaksi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder

yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut dari serangan bakteri, jamur, serangga dan jenis pathogen lainnya serta tumbuhan mampu menghasilkan vitamin untuk kepentingan tumbuhan itu sendiri dan hormone-hormon yang merupakan sarana bagi tumbuhan untuk berkomunikasi antara organnya atau jaringannya dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan mengalami proses metabolisme yang terdiri dari anabolisme, yaitu pembentukan senyawa yang lebih besar dari molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu pati, selulose, protein, lemak dan asam lemak. Proses ini membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme adalah menguraikan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil dan menghasilkan energy. Sel dalam tubuh tumbuhan mampu mengatur lintasan-lintasan metabolik yang dikendalikannya agar terjadi dan dapat mengatur kecepatan reaksi tersebut dengan cara memproduksi katalisator dalam jumlah yang sesuai dan tepat pada saat dibutuhkan. Katalisator inilah yang disebut dengan enzim yang mampu mempercepat laju reaksi metabolisme.

Secara umum, metabolisme terdiri atas 2 proses yaitu anabolisme (reaksi penyusunan) dan katabolisme (reaksi pemecahan).

Anabolisme Anabolisme adalah suatu peristiwa penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Contohnya Fotosintesis.

Katabolisme Katabolisme adalah reaksi pemecahan/ pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Contohnya Respirasi

Metabolisme merupakan keseluruhan dari reaksi kimia yang dilakukan oleh organism hidup. Metabolit merupakan molekul kecil intermediat (molekul tidak stabil dengan paruh waktu sangat pendek dalam reaksi kimiawi) dalam proses degradasi (penguraian) atau biosintesis biopolymer. Metabolisme mencakup reaksi anabolisme (reaksi yang mensintesis molekul) dan reaksi katabolisme (reaksi yang mendegradasi atau menguraikan molekul). (Horton. 2006: 296)

Reaksi anabolisme bertanggung jawab atas proses sintesis seluruh senyawa yang dibutuhkan dalam pemeliharaan sel, pertumbuhan dan reproduksi. Biosintesis merupakan pembentukan metabolit sederhana seperti asam amino, karbohidrat, koenzim, nukleotida dan asam lemak. (Horton. 2006: 296)

Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Di dalam proses ini makhluk hidup mendapat, mengubah dan memakai senyawa kimia di sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Metabolisme meliputi proses sintesis dan proses penguraian senyawa atau komponen dalam sel hidup. Proses sintesis disebut anabolisme dan proses penguraian disebut katabolisme. (Wirahadikusumah. 1985:1)

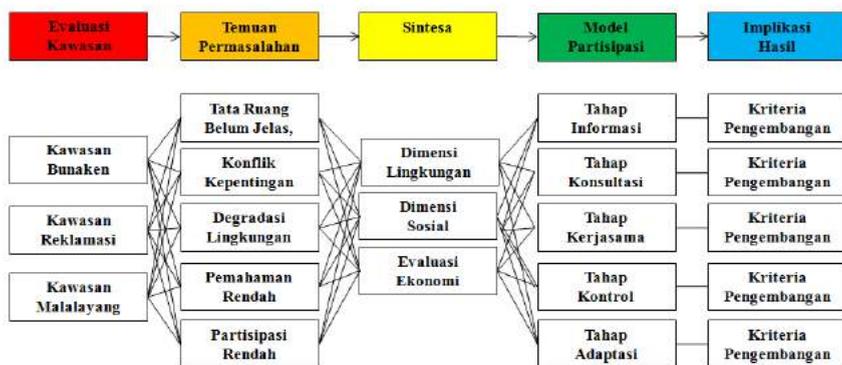
Pada beberapa spesies, semua molekul kompleks disintesis dari senyawa anorganik seperti karbondioksida, ammonia, fosfatan anorganik, dll. Organisme berfotosintesis menggunakan energi cahaya untuk menggerakkan reaksi biosintesis. (Horton. 2006: 297)

Reaksi katabolisme mengubah molekul besar atau kompleks menjadi molekul yang lebih kecil atau sederhana serta menghasilkan energi. Reaksi ini juga mengubah molekul kecil menjadi senyawa anorganik. Semua reaksi katabolisme melibatkan pemecahan senyawa yang telah disintesis oleh sel hidup atau sel yang sama, sel yang berbeda pada individu yang sama, atau sel dalam organisme yang berbeda. Selain energi yang diperlukan dalam biosintesis, organisme membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas seluler seperti transportasi dan gerak. (Horton. 2006: 296).

1. Deskripsi model pengembangan

Pengembangan pariwisata berdampak langsung terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan jika peran partisipasi terus ditingkatkan. Dengan demikian, partisipasi dalam jangka panjang mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kualitas pariwisata. Apa yang dipaparkan di atas hanya mungkin terjadi jika masyarakat luas bisa berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Partisipasi masih menjadi masalah sebagian besar masyarakat. Maka dari itu, tahapan partisipasi perlu diarahkan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Model yang ditemukan sebagai model partisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.1 Model Partisipasi Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Model ini merupakan model pengembangan yang ditemukan dari berjalannya proses partisipasi dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado. Model ini mencoba menawarkan cara partisipasi sebagai dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan analisis terhadap tiga kawasan pesisir (Bunaken, Reklamasi, Malalayang) partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata yang diidentifikasi dalam bentuk kriteria pengembangan menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam tahapan pengembangan menjadi lebih nyata. Ketika pemerintah membuat kebijakan mengembangkan pariwisata di daerah tertentu, partisipan seharusnya perlu mendapat perhatian agar mereka bisa mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata. Namun, masyarakat lokal sering luput dari perhatian pengambil kebijakan. Hal ini terjadi karena ketika berbicara tentang pariwisata, maka yang muncul dalam benak para pengambil kebijakan ialah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus pada peningkatan PAD sudah harus mulai digeser menjadi fokus kepada partisipasi agar pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir Teluk Manado dapat berkelanjutan.

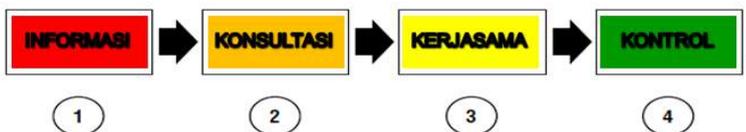
Langkah-langkah untuk mendapatkan model pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat merupakan langkah permodelan sesuai dengan tahapan pada *model logic development* berikut.

- a. Langkah I (*Input*): Hasil Evaluasi Pengembangan
- b. Langkah II (*Activities*): Sintesa Model Partisipasi
- c. Langkah III (*Output*): Analisis Aktor
- d. Langkah IV (*Outcomes*): Implementasi Model Partisipasi
- e. Langkah V (*Impact*): Implikasi Model Bagi Keberlanjutan

Langkah diatas dilakukan untuk membangun sebuah model terkait proses partisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Model ini dibangun atas dasar integrasi dari konsep hasil sintesa partisipasi yang didasarkan hasil analisis di tiga wilayah pesisir (Bunaken, Reklamasi, Malalayang). Walaupun dalam penulisan sintesa temuan-temuan lapangan dihubungkan dengan kepustakaan, tetapi dalam desain model ini hanya mendasarkan diri pada temuan lapangan. Dengan demikian, model ini merupakan rangkuman dari berbagai temuan yang dipaparkan dalam sintesa. Model partisipasi ini membantu pembaca memahami struktur partisipasi yang berlangsung dalam komunitas/masyarakat yang dianalisis, serta dampak partisipasi dalam pengembangan pariwisata terhadap ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

2. Sintesa model pengembangan

Temuan tingkat partisipasi dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado digambarkan sebagai berikut.



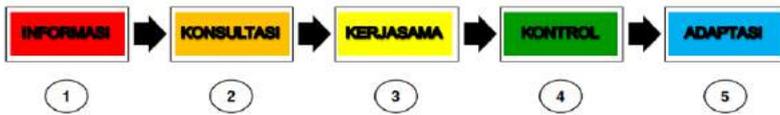
Gambar 6.2 Tahap Model Pengembangan Berbasis Partisipasi

Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan pengendalian pertumbuhan populasi manusia telah menimbulkan fenomena global yang merugikan dan saling terkait (Ismawan, 1999; Pearce & Warford, 1993). Fenomena global tersebut yaitu perubahan iklim (*climate change*) dan lingkungan. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di darat, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara, pada akhirnya merubah pola iklim dunia. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan *Perubahan Iklim dan Lingkungan*. Perubahan iklim dan lingkungan merupakan sebuah fenomena global karena penyebabnya bersifat global, yaitu disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain itu, dampaknya juga bersifat global, dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di berbagai belahan dunia.

Daya adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dari perubahan lingkungan dengan cara mengurangi kerusakan yang ditimbulkan, mengambil manfaat, atau mengatasi perubahan dengan segala akibatnya. Menurut Murdiyarso (2001), adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan salah satu cara penyesuaian yang dilakukan secara spontan maupun terencana untuk memberikan reaksi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan strategi yang diperlukan pada semua skala untuk meringankan usaha mitigasi dampak.

Adaptasi terhadap perubahan lingkungan sangat potensial untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan dampak manfaat sehingga tidak ada korban. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak strategi adaptasi dapat memberikan manfaat dalam penyelesaian jangka pendek dan maupun jangka panjang. Namun, masih ada keterbatasan dalam implementasi dan keefektifannya. Hal ini disebabkan daya adaptasi yang berbeda-beda berdasarkan daerah, negara, maupun kelompok sosial-ekonomi.

Adapun hasil sintesa model partisipasi dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir digambarkan sebagai berikut.



Gambar 6.3 Tahap Sintesa Model Partisipasi dalam Pengembangan di Kawasan Pesisir

3. Penyelenggara dan program pengembangan

Peran pemerintah merupakan kriteria penyelenggara yang paling penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga kriteria peran akademisi, swasta, dan masyarakat.



Gambar 6.4 Skala Tanggung Jawab Aktor Pengembangan

Berdasarkan analisis data penelitian, pemerintah masih dianggap sebagai aktor/penyelenggara utama yang akan menentukan terciptanya pariwisata berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat di pesisir Teluk Manado. Selanjutnya, peran akademisi menempati posisi kedua, diikuti oleh swasta dan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan model partisipasi ini, maka perlu menyusun program kegiatan yang lahir dari partisipasi masyarakat. Indikatornya harus dilihat dari implementasi pengembangan terhadap berbagai komponen partisipasi yang telah dilakukan berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir. Dengan demikian, pemetaan model partisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir lebih mudah diidentifikasi.

4. Implementasi model partisipasi

Berikut tahapan kegiatan/program yang dirumuskan berdasarkan informasi dari pemangku kepentingan menyangkut tahapan model partisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

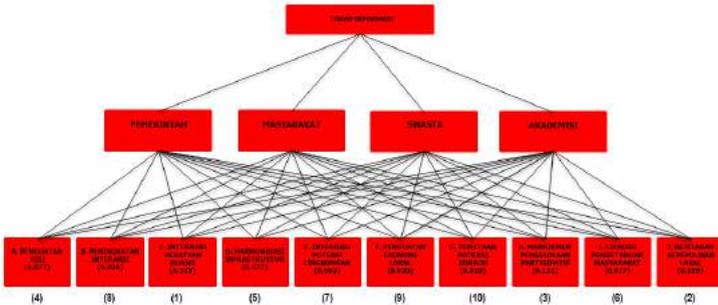
Tabel 6.1 Tahapan Partisipasi Berserta Kriteria Pengembangan

Tahap	Kriteria Kegiatan Pengembangan
Tahap Informasi	1. Penguatan Visi Pengembangan
	2. Peningkatan Interaksi Antar Stakeholder
	3. Mengintegrasikan Penataan Ruang
	4. Mengharmonisasikan Infrastruktur
	5. Integrasi Potensi Lingkungan
	6. Penguatan Ekonomi Lokal
	7. Pemetaan Potensi Konflik
	8. Manajemen Pengelolaan Partisipatif
	9. Edukasi Pengetahuan Masyarakat
	10. Memperjelas Kepemilikan Lokal
Tahap Konsultasi	1. Edukasi Masyarakat
	2. Pembentukan Jaringan
	3. Pelatihan
	4. Pemetaan Objek
	5. Memperkuat Komunikasi
	6. Pengaturan Administrasi
	7. Penataan Kelembagaan
	8. Penguatan Partisipasi

Tahap Kerjasama	1. Peningkatan Akuntabilitas
	2. Pelibatan Antar Stakeholder
	3. Penataan Pranata Sosial
	4. Promosi Kegiatan Wisata
	5. Promosi Media
	6. Peningkatan Kepercayaan Stakeholder
Tahap Kontrol	1. Evaluasi Kebijakan
	2. Pengembangan Jaringan
	3. Kerjasama Antar Kawasan Wisata
	4. Restorasi dan Konservasi Lingkungan
Tahap Adaptasi	1. Menyesuaikan.
	2. Menghindar.
	3. Bergeser.

a. Tahap informasi

Pada tahap informasi, hal pokok utama yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan kawasan pesisir ialah integrasi terhadap penataan ruang.



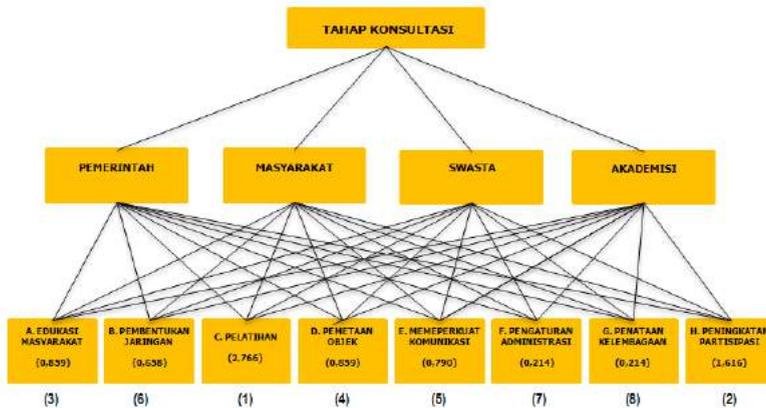
Gambar 6.5 Analisis prioritas program untuk tahap informasi

Dalam pelaksanaannya, terdapat urutan program prioritas, berikut daftarnya.

- 1) Integrasi penataan ruang kawasan pariwisata.
- 2) Kejelasan kepemilikan bagi masyarakat lokal.
- 3) Manajemen pengelolaan yang partisipatif.
- 4) Penguatan visi pengembangan pariwisata.
- 5) Harmonisasi infrastruktur pariwisata.
- 6) Edukasi pengetahuan masyarakat menyangkut pengembangan pariwisata.
- 7) Integrasi potensi lingkungan pariwisata.
- 8) Peningkatan interaksi masyarakat.
- 9) Penguatan ekonomi lokal.
- 10) Pemetaan potensi konflik.

b. Tahap konsultasi

Pada tahap konsultasi, hal pokok utama yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan kawasan pesisir ialah pelatihan bagi komunitas/masyarakat dalam melakukan pengembangan jasa pariwisata. Beberapa keluhan dari penikmat pariwisata adalah rendahnya pelayanan yang diberikan oleh para pengelola jasa pariwisata.



Gambar 6.6 Analisis Prioritas Program Untuk Tahap Konsultasi

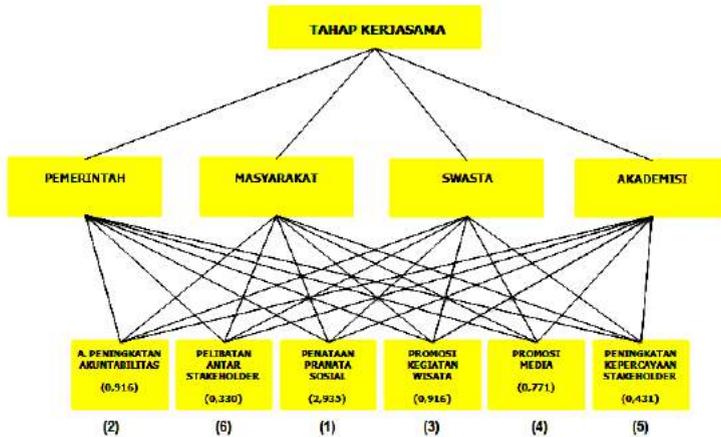
Dalam pelaksanaannya, terdapat urutan program prioritas, berikut daftarnya.

- 1) Pelatihan bagi masyarakat di kawasan pariwisata.

- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat.
- 3) Edukasi masyarakat.
- 4) Pemetaan objek pariwisata.
- 5) Memperkuat komunikasi antarstakeholder.
- 6) Pembentukan jaringan.
- 7) Pengaturan administrasi.
- 8) Penataan kelembagaan.

c. Tahap kerja sama

Pada tahap kerja sama, hal pokok utama yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan kawasan pesisir ialah penataan pranata sosial kemasyarakatan yang ada di kawasan Teluk Manado guna menunjang pariwisata yang adaptif lingkungan. Adanya komunitas warga di kawasan pesisir perlu didekati dengan program konkret yang melibatkan komunitas tersebut dalam mengembangkan pariwisata di kawasan mereka sendiri.



Gambar 6.7 Analisis prioritas program untuk tahap kerjasama

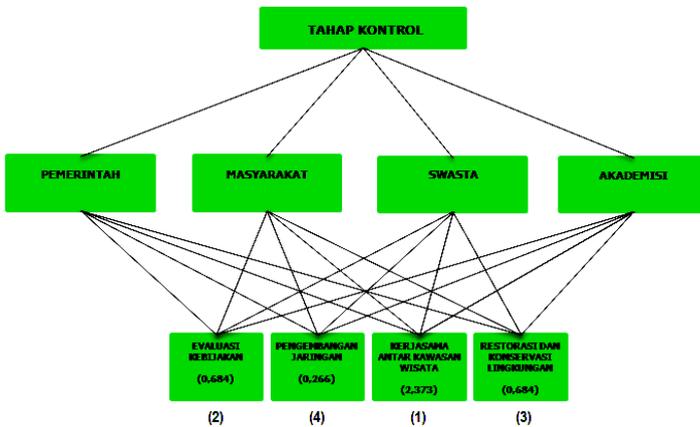
Dalam pelaksanaannya, terdapat urutan program prioritas, berikut daftarnya.

- 1) Penataan pranata sosial masyarakat.
- 2) Peningkatan akuntabilitas.
- 3) Promosi kegiatan wisata.

- 4) Promosi media.
- 5) Peningkatan kepercayaan antarstakeholder.
- 6) Pelibatan tanggung jawab antarstakeholder.

d. Tahap kontrol

Pada tahap kontrol, hal pokok utama yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan kawasan pesisir ialah kerjasama antar kawasan-kawasan pengembangan terkait. Dalam pengembangannya, kawasan ini perlu ditata dan diintegrasikan ke dalam bentuk pengembangan sesuai dengan kondisi masing-masing kawasan. Bentuk kawasan reklamasi dikembangkan untuk mendukung kawasan pantai, begitu juga dengan kawasan konservasi dan kawasan kuliner yang dikembangkan dengan *link and match* sesuai karakteristik kawasan tersebut.



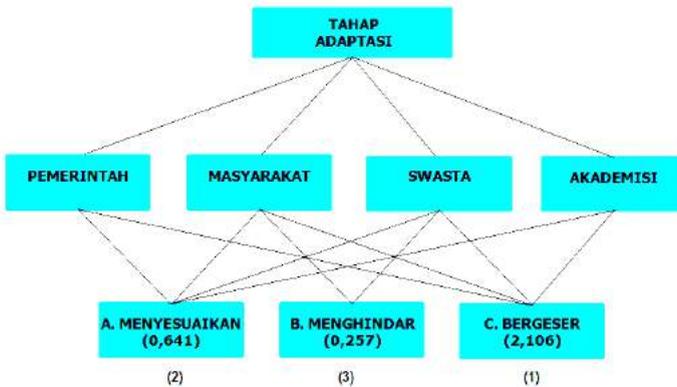
Gambar 6.8 Analisis Prioritas Program Untuk Tahap Kontrol

Dalam pelaksanaannya, terdapat urutan program prioritas, berikut daftarnya.

- 1) Kerja sama antarkawasan.
- 2) Evaluasi kebijakan.
- 3) Restorasi dan konservasi lingkungan.
- 4) Pengembangan jaringan.

e. Tahap adaptasi

Berdasarkan peringkat pada tahap adaptasi, terdapat urutan prioritas dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Pertama*, dengan bergeser dari kawasan yang terkena dampak perubahan lingkungan dengan tetap mempertahankan kondisi pengembangan. *Kedua*, komunitas masyarakat menyesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan. *Ketiga*, menghindari dari kawasan pengembangan tersebut. Pemerintah sebagai pengambil keputusan di Kota Manado memegang peranan yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis partisipasi komunitas masyarakat.



Gambar 6.9 Analisis Prioritas Program untuk Tahap Adaptasi

Dalam pelaksanaanya, terdapat urutan program prioritas, berikut daftarnya.

- 1) Bergeser.
- 2) Menyesuaikan.
- 3) Menghindar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, S. 2002. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep, Model, Kebijaksanaan, Instrumen serta Strategi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Adrianto, L. 2006. *Sinopsis Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Alamsyah, T. A. 1993. "Regionalisme dalam Penataan Permukiman di Gugus Pulau Mikro (Studi Kasus Bioregion Kepulauan Seribu)". Disertasi pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Ardiwijaya RL, *et al.* 2007. *Laporan Teknis-Monitoring Ekologi Taman Nasional Karimunjawa, Monitoring Fase 2*. Bogor: Wildlife Conservation Society-Marine Program Indonesia.
- Aref, F. & M. B. Redzuan. 2009. "Community Capacity Building for Tourism Development". *Journal of Human Ecology*, 27 (1), 21-25.
- Arnstein, S. R 1969. "A Ladder of Citizen Participation". *American Planning Association*, 35(4).
- Ashley, C. 2000. *The Impacts of Tourism on Rural Livelihoods: Namibia's Experience*. London: Working Paper 128, Overseas Development Institute.
- Bappeda Kota Manado. 2005. *Rencana Tata Ruang Kota Manado*.
- Beeton, S. 2006. *Community Development Through Tourism*. Collingwood: Landlinks Press.
- Bengen, D. G. 2004. *Ekosistem dan sumber daya alam pesisir dan laut serta prinsip pengelolaannya*. Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya

- Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Biro Pusat Statistik. 2008. *Sulawesi Utara Dalam Angka*.
- Bjork, P. 2000. "Ecotourism from a Conceptual Perspective, an Extended Definition of a Unique Tourism Form". *International Journal of Tourism Research*, 2, 189-202.
- Britton, S. G. 1982. "The Political Economy of Tourism in the Third World". *Annals of Tourism Research*, 9(3), 331-358.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 1980. "The concept of Tourist Area Cycle of Evolution and Implications for Management of Resources". *The Canadian Geographer*, 24(1), 5-12.
- Butler, R. 2002. "Implementing Sustainable Tourism Development on a Small Island: Development and Use of Sustainable Tourism Development Indicators in Samoa". *Journal of Sustainable Tourism*, 10(5), 363-387.
- Ceballos-Lascurain, H. 1995. *Ekoturisme sebagai suatu Gejala yang Menyebar ke Seluruh Dunia*. Dalam Lingberg K & DE Hawkins (Ed). *Ekoturisme: Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola*. The Ecotourism Society dan USAID. Jakarta.
- Christie P. D., Makapedia, & Lalamentik. 2003. "Biophysical Impact and Line to Integrated Coastal Management Sustainability in Bunaken National Park, Indonesia". *Journal of Coastal and Marine Resources, Special Edition*, 1, 8.
- Cicin-Sain, B. & R.W. Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management, Concept and Practice*. Washington DC: Island Press.
- Clark, J. R. 1995. *Coastal Zone Management Handbook*. Florida: Lewis Publishers.
- Conyers, D. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Corbridge, S. 1986. *Capitalist World Development: A Critique of Radical Development Geography*. London: MacMillan.

- Cupples, J. 2005. "What is Community Capacity Building?". Diunduh 4 Mei 2012.<<https://www.ccwa.org.uk/v2/downloads/cms/1121303664.pdf>>.
- Dahl, C. 1997. Integrated Coastal Resources Management and Community Participation in a Small Island Setting. *Journal of Ocean and Coastal Management*, 36(1), 23-45.
- Dahuri, R, et al. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dowling, R. K. 1995. Ecotourism, Concept, Design, and Strategy. *Journal of Tourism Recreation Research*, 20, 60-65.
- Dunn, W. 1999. *Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Dymond, S. C. 1997. Indicators of Sustainable Tourism in New Zealand: A Local Government Perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 5(4), 279-292.
- Erawan, R. B. 2000. Mewujudkan Tata Ruang Nasional Berwawasan Lingkungan Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Arena Hukum*, 12(4).
- Fallon, F. 2001. Conflict, Power and Tourism on Lombok. *Current Issues in Tourism*, 4(6), 481-502.
- Fauzi, A & S. Anna. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fandeli C & Mukhlison. 2000. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.
- Farrell T. A & Jeffrey L. M. 2002. The Protected Area Visitor Impact Management (VIM) Framework: A Simplified Process for Making Management Decisions. *Journal of Sustainable Tourism*, 10(1), 37-51.
- Frechtling, J. A. 2007. *Logic modeling program evaluation. (1st ed)*. United States of America: Jossey-Bass.
- Ghimire, K. 1997. Emerging Mass Tourism in the South. UNRISD. *Discussion Paper*, 85. Geneva, UNRISD.
- Gie, D. K. K. 2002. "Pengaruh Pemanasan Global terhadap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Materi pada Seminar Nasional Pengaruh Pemanasan Global terhadap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

- Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKRTN).
- Glassburner, B. 1971. *The Economy of Indonesia, Selected Readings*. Ithaca: Cornell University Press.
- Goodwin, R. F. 1999. Redeveloping Deteriorated Urban Waterfronts: The Effectiveness of U.S. Coastal Management Programs. *Journal Coastal Management*, 27, 239-269.
- Gunn, C. A. 1993. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*. edisi ketiga. Taylor & Francis Publisher.
- Hall, C. M. 2001. Trends in Ocean and Coastal Tourism: The End of the Last Frontier. *Journal of Ocean and Coastal Management*, 37, 429-449.
- Hamdiah, S. 2004. "Kajian dan Kesesuaian Pengembangan Pariwisata Bahari Di Kepulauan Abang Kota Batam". Tesis pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hardin, G. 1968. "The Tragedy of the Commons". Diunduh 18 April 2013. <<http://links.jstor.org/sici?B2-N>>.
- Harjadi, B. 2004. Karakteristik Sumber Daya Lahan Sebagai Dasar Pengelolaan DAS di Sub DAS Merawu, DAS Serayu. *Forum Geografi*, 18(2), 98.
- Haughton, G & Hunter, C. 1994. *Sustainable Cities*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Hermantoro, H. 2009. Pengelolaan Bidang Pariwisata Bahari dalam Pelaksanaan Strategi Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 4(1).
- Hershman MJ, *et al.* 1999. The Effectiveness of Coastal Zone Management in the United States. *Journal of Coastal Management*, 27, 113-138.
- Hess, A. L. 1990. Overview Sustainable Development and Envioremental Management of Small Islands. Dalam W. P d'Ayala & P. Hein (Ed). *Sustainable Development and Envioremental Management of Small Islands*. Paris: UNESCO.
- Hidayah. 2000. *Konsep dan Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari*. Jakarta: Seawatch Indonesia.
- Hidayati D, *et. al.* 2003. *Ekowisata: Pembelajaran dari Kalimantan Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hunt, J. 2005. *Capacity Building in the International Development*

- Context: Implications for Indigenous Australia.* Australia: Australian National.
- John W, *et al.* 2005. *Kewirausahaan (Entrepreneurship)*. edisi keenam. New York: Mc. Graw Hill.
- Kamsma, T & Bras, K. 2000. Gili Trawangan-from Desert Island to 'Marginal' Paradise: Local Participation, Small-Scale Entrepreneurs, and Outside Investors in an Indonesian Tourist Destination. Dalam G. Richards & D. Hall (Ed). *Tourism and Sustainable Community Development*. London: Routledge.
- Karim, T, *et al.* 2008. "Analysis of Water Use Patterns and Conflicts in The Sa Pablo Plain and Alcudia Bay (Majorca, Spain)". Diunduh 15 Desember 2012.< <http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a83/00800930.pdf>>.
- Kay, R & J. Alder. 1999. *Coastal Planning and Management*. London: E & FN Spon.
- Klaric, Z. 1999. *Carrying Capacity Assessment for Tourism Development*. Egypt: Priority Action Programme, Regional Activity Center.
- Komarudin, M. A. 1999. *Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Dirjen Cipta Karya Departemen PU & Deputi Bidang Kebijaksanaan Teknologi BPPT.
- Kusumastanto, T. 2003. *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laurens, J. M. 2002. *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Marion, J. L & Leung Y. F. 2001. Trail Resources Impacts and an Examination of Alternative Assesment Techniques. *Journal of Park and Recreations Administration*, 19(3), 17-37.
- Masberg, B. A & Morales N. 1999. A Case Analysis of Strategies in Ecotourism Development. *Journal of Aquatic Ecosystem Healt and Management*, 2, 289-300.
- McCool, S. F & D W Lime. 2001. Tourism Carrying Capacity: Tempting Fantasy or Usefull Reality?. *Journal of Sustainable Tourism*, 9(5), 113-138.
- Meiyani, E. 2004. Pendayagunaan Pengetahuan Lokal bagi Masyarakat Maritim. *Jurnal Ilmiah Prospek*, 29(3), 35-44.

- Meadows D, *et al.* 1972. *The Limits to Growth*. New York: Universe Books.
- Mehlum, HK, Moene, & Torvik R. 2006. Institutions and The Resource Curse. *The Economic Journal*, 116, 1-20.
- Meyer, D. 2006. "Caribbean Tourism, Local Sourcing and Enterprise Development: Review of The Literature". Diunduh 21 Januari 2012. <http://www.Propoor tourism.org.uk/18_domrep.pdf>.
- Milne, S & Ateljevic, I. 2001. Tourism, Economic Development and The Global-Local Nexus: Theory Embracing Complexity. *Tourism Geographies*, 3(4), 369-393.
- Mitchel, J & Faal, J. 2007. Holiday Package Tourism and The Poor in The Gambia. *Development Southern Africa*, 24(3).
- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murphy, P. E. 1985. *Tourism: A Community Approach*. New York: Methuan.
- Neto, F. 2003. A New Approach to Sustainable Tourism Development: Moving Beyond Environmental Protection. *Desa Discussion Paper*, 29.
- Newman, L. W & Allyn Bacon. 1997. *Social Research Methode: Cualitative & Quantitative Approach*. Boston.
- Nikijuluw, V. P. H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Nurisyah. 2006. "Perencanaan Lanskap Kawasan Wisata". Bahan Kuliah Perencanaan Lanskap Kawasan Wisata pada Program Doktor Sekolah Pascasarjana Intitut Pertanian Bogor.
- Our Common Future. 1987. *World Commission on Environmenoutal and Development*. Oxford: Oford University Press.
- Pandey RN, *et al.* 1995. "Case Study on The Effect of Tourism on Culture and the Environment. Diunduh 5 Desember 2012. <001226/122619eo.pdf>.
- Panudju, B. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Parkin D, *et al.* 2000. Providing for a Diverse Range of Outdoor Recreation Opportunities: A "Micro-ROS" Approach to Planning

- and Management. *Journal Australian Parks and Leisure*, 2(3), 41-47.
- Pearce, D. G & Kirk R. M. 1986. Carrying Capacities for Coastal Tourism. *Journal of Enviromental Management*, 9(1), 3-7.
- Pearce, D. G & Turner R. K. 1991. *Measuring Sustainable Development*. London: Elsevier Science Ltd.
- Pemerintahan Provinsi Kota Manado. 2009. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado*.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2014. *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara*.
- Permanasari, I. K. 2006. Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi. *Journal Kepariwisata Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata*, 1(4), 69-82.
- Poerbo, H. 1999. *Lingkungan Binaan untuk Rakyat*. Yayasan AKTIGA
- Pollinac, Pomeroy R, & Bunce L. 2003. Factors Influencing the Sustainability of Integrated Coastal Management Project in Central Java and North Sulawesi, Indonesia. *Journal of Coastal and Marine Resources, Special Edition*, 1.
- Prabawa, T. S. 2010. "The Tourism Industry Under Crisis, The Struggle of Small Tourism Enterprises in Yogyakarta Indonesia". Disertasi pada Department of Social Sciences Vrije Universiteit Amsterdam.
- Preister, K. 1989. The Theory of Management and Tourism Impacts. *Tourism Recreation Research*, 14(1), 15-22.
- Purnomo, T. C. 2008. "Perbandingan Model Regresi Linier Klasik dan Tobit Bivariat Studi Kasus Pada Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Konsumsi Daging dan Susu." Tesis pada Jurusan Statistika FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Rahmadani. 2005. *Sistem Pendukung Kompetensi: Suatu Wacana Struktural, Idealisasi dan Implementasi, Konsep Pengambilan Keputusan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ramli, 2010. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pantai Kota Makassar. *Jurnal Kepariwisata Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata*, 5(3), 299-318.

- Rowe A, et al. 2002. *Carrier Award Travel and Tourism Standard Level*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saaty, T. L. 1993. *Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin: Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Terjemahan *Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo
- Salim, E. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG.
- Samawi, M.F. 2007. "Model Pengendalian Pencemaran Perairan Pantai Kota". *Jurnal Sains & Teknologi*, 7(1), 1-12.
- Sastropoetro, S. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Satria. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Cidesindo.
- Saveriades, A. 2000. "Establishing the Social Tourism Carrying Capacity for the Tourist Resorts of The East Coast of The Republic of Cyprus". *Journal of Tourism Management*, 25, 275-283.
- Schianetz K, Lydia K, & David L. 2007. "The Learning Tourism Destination: The Potensial of a Learning Organisation Approach for Improving the Sustainability of Tourism Destinations". *Journal of Tourism Managemen*, 28, 1485-1496.
- Sekartjekarini, S & Legoh K. N. 2004. *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Innovative Development of Eco Awareness (IdeA).
- Shah, K & Gupta V. 2000. *Tourism, The Poor and Other Stakeholders: Experience in Asia*. London: ODI.
- Shirta, N. 2005. "Kebijakan Pembangunan Pariwisata sebagai Program Unggulan". *Majalah Ilmiah Pariwisata*, 1.
- Sievanen, L. 2003. "Shifting Communities and Sustainability Implications". *Indonesion Journal of Coastal and Marine Resources, Special Edition*, 1.
- Simon F, Yeamduan N, & Daniel P. 2004. "Carrying Capacity in the Tourism Industry: A Case Study of Hengistbury Head". *Journal of Tourism Management*, 25, 275-283.

- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sorensen, T & Epps, R. 2003. The Role of Tourism in the Economic Transformation of the Central West Queensland Economy. *Australian Geographer*, 34(1), 73-89.
- Sulekale, D. D. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin". *Jurnal Ekonomi Rakyat*.<<http://www.ekonomirakyat.org>>
- Sunarti. 2001. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok*. Semarang
- Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir Tropis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryadi, K & Ramdhani, A. 1998. *Sistem Pendukung Keputusan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tahir A, Bengen D. G, & Susilo, S. B. 2002. "Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Teluk Balik Papan". *Jurnal Pesisir dan Lautan*, 4(3), 1-16.
- Tambunan, T. 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Taslim, A. 2009. "Akuntabilitas dan Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang di Selat Lembeh, Kota Bitung". Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Tetsu, K. 2006. "Tourism Development and regional development in Low-income Developing Countries". Diunduh 12 Desember 2012.<<http://www.pideorg.pk/pdf/PDR/2006/Volume3/417-424.pdf>>.
- The National Institute for Defense Studies. 1999. *East Asian Strategic Review: 1998-1999*.
- Tisdel, C. 1996. "Ecotourism, Economic and the Environment: Observation from China". *Journal of Travel Research*, 34(4), 11-19.
- Tombielu N, *et al*. 2000. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang di Kawasan Bunaken dan Sekitarnya, Sulawesi Utara". *Jurnal Pesisir dan Lautan*, 3(1).
- Tulungen, J. J. 2000. "Pelibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

- Di Sulawesi Utara”. Talk Show Peluang dan Tantangan di Era Baru Kelautan Indonesia, Marine Techno and Fisheries 2000, Kerjasama SEAWATCH Indonesia-BPPT dan HIMITIKA FPIK Institut Pertanian Bogor.
- Turner R, *et al.* 1998. “Towards Integrated Modelling and Analysis in Coastal Zones: Principles and Practices”. *LOICZ Reports & Studies*, 11.
- Turner RK, Adger W. N, & Lorenzoni, I. 1998. Towards Integrated Modelling and Analysis in Coastal Zones: Principles and Practices. *LOICZ Reports and Studies*, 11.
- Uddhammar, E. 2006. “Development, Conservation and Tourism: Conflict or Symbiosis?”. Diunduh 17 Oktober 2012.< <http://dx.doi.org/101080/09692290600839923>>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UNEP. 2001. “Convention on Biological Diversity: Framework for The Development of Guidelines for Activities Related to Sustainable Tourism Development and Biological Diversity in Vulnerable Terrestrial, Marine and Mountain Ecosystems”. *Santo Domingo: UNEP*.
- United Nation World Tourism Organization (UNWTO). 2004. *Indicators of sustainable development for tourism destinations, A Guidebook*. Madrid: World Tourism Organization.
- University Center for Aboriginal Economic Policy Research, Discussion Paper No. 278/2005. Diunduh 5 Agustus 2012.<https://dspace.anu.edu.au:8443/bitstream/1885/43047/1/2005_Dp278.pdf>.
- Wahyono A, *et al.* 2000. *Hak Ulayat Laut di Kawasan Indonesia Timur*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wong, P. P. 1998. “Coastal Tourism Development in Southeast Asia: Relevance and Lessons for Coastal Zone Management”. *Journal of Ocean and Coastal Management*, 38, 89-109.

Yulianda, F. 2007. “Ekowisata Bahari Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Berbasis Konservasi. Makalah Seminar Sains Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor”.

PROFIL PENULIS

Felly Ferol Warouw

Lahir pada tanggal 2 Januari 1978
Di Langowan Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara. Indonesia.

- Dosen tetap Universitas Negeri Manado (UNIMA),
- Tim Ahli DPRD Sulut, Memiliki Lisensi Penyusun AMDAL/UPL-UKL



Istri:

Janthy P. Karundeng

Anak-anak:

1. Franjamegaputri
2. Eljafkunfavreau

Pendidikan:

1. Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Fakultas Teknik (ST.)
2. Universitas Azzahra Jakarta Fakultas Hukum (SH)
3. Aix Marseille III Universite Magister Competitive Intelligence (M.Eng)
4. Universitas Indonesia Program Doktor Ilmu Lingkungan (Dr)
5. Sementara Studi pada PPS UNIMA Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (MPd)

Christi Diana Mambo

Lahir pada tanggal 28 Juli 1981 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Indonesia.

- Dosen tetap Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado

Suami:

Viktory N.J. Rotty

Anak-anak:

1. Faith Hope Love Rotty
2. Chantal Love Rotty
3. Luke Boy Miroslav Rotty

Pendidikan:

1. Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Fakultas Kedokteran (dr.)
2. Universitas Gajah Mada (UGM) Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis (M.Sc.)
3. Sementara Studi pada Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Program Doktor Ilmu Kelautan (Dr.)



Brianne Eucleysia J Komedien

Lahir pada tanggal 10 Oktober 1972 di Langowan Kabupaten Minahasa. Sulawesi Utara

- Dosen tetap Universitas Negeri Manado (UNIMA)

Suami:

Richard M Sumangkut

Anak-anak.

1. Cliff Matthew Miracle Sumangkut
2. Verrel Brave Mark Sumangkut



Pendidikan

1. Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S.Pi)
2. Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Pendidikan Dasar (M.Pd)
3. Sementara Studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado (UNIMA) Program Studi Manajemen Pendidikan (Dr)

Lady Grace Jane Giroth

Lahir pada tanggal 22 Juni 1983 di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia.

- Dosen tetap Universitas Teknologi Sulawesi Utara (UTSU) Manado

Suami:

Lawdie Lintang

Anak-anak:

1. Reuben Lexa Lionel Lintang
2. Lincoln Lexperrie Nathanael Lintang



Pendidikan:

1. Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA Bandung Jurusan Bahasa Inggris (S.S)
2. Program Pascasarjana Magister Administrasi Pemerintahan daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (M.Si.)
3. Sementara Studi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Manado (M.Pd.)
4. Sementara Studi pada Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Manado (Dr.)

